

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat adalah salah satu entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

- a) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya;
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan saldo anggaran lebih awal dan penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan yang diperbandingkan dengan perubahan SAL pada periode sebelumnya;
- c) Neraca menyajikan aset, utang dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya;
- d) Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban operasional tahun berjalan yang diperbandingkan dengan pendapatan dan beban operasional periode sebelumnya;
- e) Laporan Arus Kas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya
- f) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan posisi ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional serta dampak kumulatif perubahan kebijakan/koreksi kesalahan yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

Untuk memudahkan dalam memahami Laporan Keuangan maka dibuat catatan atas laporan keuangan. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Papua Barat selama satu periode tahun anggaran 2024.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas ekonomi, sosial maupun politik, berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan (Tahun Anggaran 2024).Yaitu membandingkan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan, dengan anggaran yang telah ditetapkan serta untuk mengetahui Sisa Perhitungan Tahun Anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah, antara lain:

- a. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
- b. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- c. Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- d. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- e. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- o. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua Barat; dan
- p. Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- q. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari Laporan Keuangan disusun dengan maksud untuk memberikan pemahaman yang memadai bagi pembaca laporan keuangan dalam menelaah data kuantitatif yang disajikan pada laporan keuangan. Oleh karena itu, selain pendahuluan yang telah diuraikan sebelumnya, Catatan atas Laporan Keuangan juga meliputi gambaran ekonomi makro secara regional yang digunakan dalam membuat kebijakan keuangan dan merealisasikan kinerja dari alokasi anggaran.

Catatan atas Laporan Keuangan juga menguraikan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan disertai pengungkapan yang cukup atas pos-pos laporan keuangan. Terakhir juga diungkapkan informasi non keuangan yang mempengaruhi interpretasi penyajian laporan keuangan.

Secara rinci sistematika Catatan atas Laporan Keuangan disusun per bab mencakup:

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan.

1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Ekonomi makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran 2024.

2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Memuat penjelasan mengenai kondisi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat yang didasarkan pada beberapa kategori seperti jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, perdagangan, pertanian, kehutanan, dan lain-lain.

2.3. Struktur Ekonomi

Memuat penjelasan mengenai sektor-sektor yang memberikan kontribusi pada PDRB Provinsi Papua Barat.

2.4. Kebijakan keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca dan Laporan Arus Kas.

2.5. Pencapaian target kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan pemerintahan daerah.

Bab III Ikhtisar Capaian dan Hambatan Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar capaian kinerja keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan.

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Memuat hambatan atau kendala dalam pencapaian target kinerja APBD.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah

Menyajikan informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah.

4.2. Entitas akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis kas atau basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penerapan kebijakan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana).

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V Penjelasan Pos Laporan Keuangan

Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan sebagai berikut:

5.1. LRA

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos-pos yang terdiri atas:

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Surplus/Defisit
- d. Penerimaan Pembiayaan
- e. Pengeluaran Pembiayaan

5.2. LPSAL

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos-pos yang terdiri atas:

- a. Saldo anggaran lebih awal
- b. Penggunaan SAL pada penerimaan pembiayaan awal
- c. Saldo anggaran lebih akhir

5.3. Neraca

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos-pos yang terdiri atas:

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas

5.4. LO

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos-pos yang terdiri atas:

- a. Pendapatan operasional
- b. Beban operasional
- c. Surplus/defisit operasional

5.5. LAK

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos-pos yang terdiri atas:

- a. Arus kas aktivitas operasi
- b. Arus kas aktivitas investasi aset non keuangan
- c. Arus kas aktivitas pembiayaan
- d. Arus kas aktivitas non anggaran

5.6. LPE

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos-pos yang terdiri atas:

- a. Saldo ekuitas awal
- b. Surplus/defisit kegiatan operasional
- c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/koreksi kesalahan

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan yaitu domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro/ Ekonomi Regional

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat (Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2025), Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan), yaitu:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 21,66%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,13%;
- c. Gini Ratio sebesar 0,385%;
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 67,69%;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 20,80%;
- f. Tingkat Inflasi sebesar 2,53%; dan
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp76.177,48 Juta.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi Papua Barat periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan

di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 13/01/91/Th. XIX, 15 Januari 2025 Profil Kemiskinan Provinsi Papua Barat September 2024 sebagai berikut:

1. Persentase penduduk miskin Papua Barat pada September 2024 sebesar 21,09 persen, menurun 0,57 persen poin terhadap Maret 2024.
2. Jumlah penduduk miskin Papua Barat pada September 2024 sebesar 108,28 ribu orang, turun 1,88 ribu orang terhadap Maret 2024.
3. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 8,17 persen, naik menjadi 9,50 pada September 2024. Sementara persentase penduduk miskin wilayah perdesaan pada Maret 2024 sebesar 27,68, turun menjadi 26,34 persen pada September 2024.
4. Dibandingkan Maret 2024, jumlah penduduk miskin Papua Barat September 2024 perkotaan naik sebanyak 2,36 ribu orang (dari 12,82 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 15,18 ribu orang pada September 2024). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 4,23 ribu orang (dari 97,34 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 93,11 ribu orang pada September 2024).
5. Garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp816.613 per kapita per bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp609.768 (74,67 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp206.845 (25,33 persen).
6. Pada September 2024, secara rata-rata rumah tangga miskin di Papua Barat memiliki 4,14 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp3.380.777,82/rumah tangga miskin/bulan.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Papua Barat, Maret - September 2024

Jumlah penduduk miskin di Papua Barat pada September 2024 mencapai 108,28 ribu orang. Dibandingkan Maret 2024, jumlah penduduk miskin menurun 1,8 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 21,09 persen. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret - September 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 2,36 ribu orang menjadi 15,18 ribu orang. Sementara di perdesaan turun sebesar 4,23 ribu orang menjadi 93,11 ribu orang. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan di perkotaan 9,50 persen dan di perdesaan sebesar 26,34 persen.

Tabel 2.1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Papua Barat menurut Daerah, Maret - September 2024

Daerah Tempat Tinggal/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2024	12,82	8,17
September 2024	15,18	9,50
Perdesaan		
Maret 2024	97,34	27,68
September 2024	93,11	26,34
Perkotaan + Perdesaan		
Maret 2024	110,16	21,66
September 2024	108,28	21,09

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret dan September 2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan, Maret - September 2024

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode Maret - September 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 4,575, meningkat dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 4,348. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), pada periode yang sama meningkat dari 1,278 menjadi 1,466 (lihat Tabel 1.1.2).

Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada September 2024, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 1,153, sedangkan di perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 6,121. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan adalah sebesar 0,215, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 2,031.

Tabel 2.1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Papua Barat menurut Daerah Tempat Tinggal, Maret - September 2024

Indeks	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2024	0,925	5,874	4,348
September 2024	1,153	6,121	4,575
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
Maret 2024	0,180	1,768	1,278
September 2024	0,215	2,031	1,466

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret dan September 2024

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat (Berita Resmi Statistik No. 139/11/91/Th.XVII, 5 November 2024) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua Barat Tahun 2024 adalah sebesar 4,13%.

Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Papua Barat mengalami pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja yang signifikan, mencapai 424.691 orang pada Agustus 2024. Angka ini mengindikasikan adanya potensi besar dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagian besar penduduk usia kerja telah aktif dalam angkatan kerja, menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 290.077 orang bekerja dan 12.511 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 7.066 orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 6.902 orang, sementara pengangguran naik sebanyak 164 orang. Meskipun jumlah angkatan kerja meningkat, tingkat pengangguran juga mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan pekerjaan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan adanya disparitas gender yang signifikan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja. Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 81,42 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 59,80 persen. Dibandingkan Agustus 2023, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,40 persen poin dan TPAK perempuan naik sebesar 2,26 persen poin. Laki-laki memiliki tingkat partisipasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan struktural dan sosial budaya yang menghambat perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan ekonomi.

Tabel 2.2.1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2023–Agustus 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Ags 2023–Ags 2024	
	orang	orang	orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	419.496	424.691	5.195	1,24
Angkatan Kerja	295.522	302.588	7.066	2,39
- Bekerja	283.175	290.077	6.902	2,44
- Pengangguran	12.347	12.511	164	1,33
Bukan Angkatan Kerja	123.974	122.103	-1.871	-1,51
	persen	persen	persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,45	71,25		0,80
- Laki-Laki	81,82	81,42		-0,40
- Perempuan	57,54	59,80		2,26

Tabel 2.2.2 Karakteristik Pengangguran, Agustus 2023–Agustus 2024

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2023 persen	Agustus 2024 persen	Perubahan Ags 2023–Ags 2024 persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,18	4,13	-0,05
TPT Menurut Jenis Kelamin			
- Laki-Laki	3,70	4,06	0,36
- Perempuan	4,94	4,25	-0,69
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal			
- Perkotaan	5,27	5,32	0,05
- Perdesaan	3,67	3,54	-0,13
TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
SD ke Bawah	2,43	3,72	1,29
Sekolah Menengah Pertama	2,02	1,78	-0,24
Sekolah Menengah Atas	6,76	5,71	-1,05
Sekolah Menengah Kejuruan	10,56	7,26	-3,30
Diploma I/II/III	3,57	8,00	4,43
Diploma IV, S1, S2, S3	3,77	2,46	-1,31

2.1.3 Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

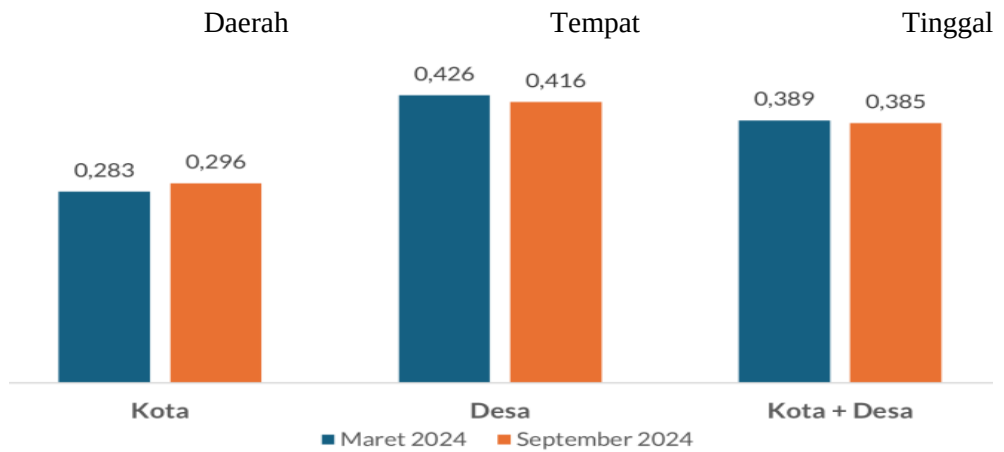
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat (Berita Resmi Statistik No. 14/01/91/Th. XIX, 15 Januari 2025), Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Papua Barat September 2024 sebagai berikut:

- Pada September 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Papua Barat yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,385.
- Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,296, dan Gini Ratio wilayah perdesaan sebesar 0,416.
- Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,02 persen. Hal ini mencerminkan bahwa pengeluaran penduduk pada September 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 22,86 persen yang berarti tergolong ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 15,86 persen, yang berarti tergolong dalam ketimpangan sedang.

Gambaran Gini Ratio Provinsi Papua Barat Maret - September 2024

Gini Ratio merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk. Nilai Gini Ratio berada pada rentang antara 0 sampai dengan 1, dimana semakin tinggi nilai Gini Ratio mengindikasikan semakin timpangnya pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Gambar 1.3.1 berikut menyajikan Gini Ratio Provinsi Papua Barat Maret dan September 2024 yang dirinci menurut wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada September 2024, Gini Ratio Provinsi Papua Barat tercatat sebesar 0,385, turun sebesar 0,004 poin dibanding Maret sebesar 0,389. Jika ditinjau menurut daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2024 adalah sebesar 0,296. Sementara di daerah perdesaan tercatat lebih tinggi yaitu sebesar 0,416.

Gambar 2.3.1 Gini Ratio Provinsi Papua Barat Maret - September 2024 menurut



Tabel 2.3.2 Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Papua Barat, Maret
September 2024 (Persentase)

Daerah/Tahun	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Teratas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Maret 2024	23,54	36,78	39,68	100
September 2024	22,86	37,37	39,77	100
Perdesaan				
Maret 2024	16,63	31,94	51,43	100
September 2024	15,86	35,11	49,03	100
Perkotaan+Perdesaan				
Maret 2024	17,84	34,78	47,38	100
September 2024	17,02	37,25	45,73	100

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret & September 2024

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu :

- Rendah (< 60);
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat (Berita Resmi Statistik No.141/11/91/Th.XVIII, 15 November 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat Tahun 2024 mencapai 67,69; meningkat 0,85 poin (1,27 persen) dibanding capaian tahun sebelumnya.

- Selama periode 2022-2024, IPM Provinsi Papua Barat rata-rat meningkat sebesar 1,25 persen per tahun.

Gambar 2.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat, 2022
2024



- Peningkatan IPM Provinsi Papua Barat 2024 terjadi pada semua dimensi, baik pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak.

Gambar 2.4.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat
Menurut Dimensi Penyusunnya, 2022-2024

Komponen	Satuan	2022	2022	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	68,06	68,28	68,47
Pendidikan				
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,14	13,16	13,17
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,43	7,66	7,86
Standar Hidup Layak				
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp 000	8.058	8.381	8.805
IPM		66,03	66,84	67,69

- Pertumbuhan IPM Provinsi Papua Barat 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi terutama oleh naiknya rata-rata pengeluaran

perkapita yang disesuaikan. Indikator ini naik dari 8,38 juta di tahun 2023 menjadi 8,80 juta di tahun 2024. Pada dimensi pengetahuan, tahun 2024, angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Papua Barat mencapai 13,17 tahun yang artinya anak-anak umur 7 tahun memiliki harapan untuk dapat menikmati pendidikan selama 13,17 tahun atau setara menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,01 tahun dari tahun 2023 yang sebesar 13,16 tahun. Selain itu, Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,20 tahun pada tahun 2024 dari sebelumnya 7,66 tahun menjadi 7,86 tahun.

- Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga usia 68,47 tahun, lebih lama 0,19 tahun dibandingkan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).

Tabel 2.4.3 IPM dan Komponen IPM Kabupaten dan Provinsi, 2023-2024

Provinsi	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Riil per Kapita		IPM	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(10)	(11)	(14)	(15)	(18)	(19)
Fakfak	71,44	71,57	14,78	14,79	9,17	9,32	7.851	8.159	70,85	71,52
Kaimana	68,96	69,20	12,50	12,51	8,80	8,97	8.749	9.242	68,31	69,20
Teluk Wondama	65,32	65,50	11,90	11,91	7,27	7,38	8.490	8.887	63,84	64,52
Teluk Bintuni	67,75	68,05	12,44	12,62	8,51	8,67	10.324	10.592	69,01	69,79
Manokwari	72,25	72,51	13,78	13,79	8,54	8,67	12.566	13.008	74,52	75,15
Manokwari Selatan	68,09	68,26	12,56	12,78	6,96	7,17	5.948	6.139	61,55	62,45
Pegunungan Arfak	67,71	67,79	11,79	11,80	5,51	5,72	5.438	5.722	57,82	58,71
Papua Barat	68,28	68,47	13,16	13,17	7,66	7,86	8.381	8.805	66,84	67,69

Keterangan:
 UHH : Umur Harapan Hidup dari hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF)
 HLS : Harapan Lama Sekolah
 RLS : Rata-rata Lama Sekolah
 IPM : Indeks Pembangunan Manusia

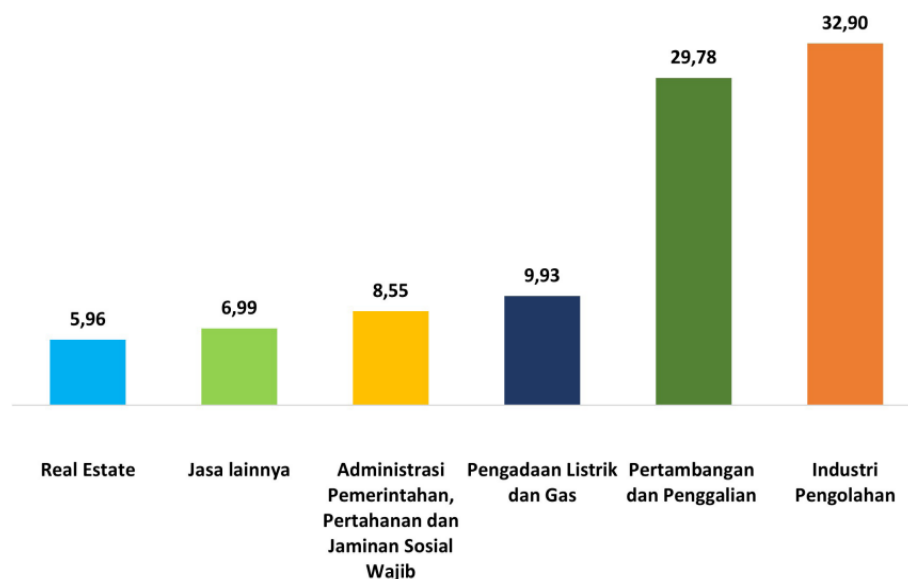
2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat (Berita Resmi Statistik No.29/02/91/Th.XIX, 05 Februari 2025, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat Triwulan IV-2024 sebagai berikut:

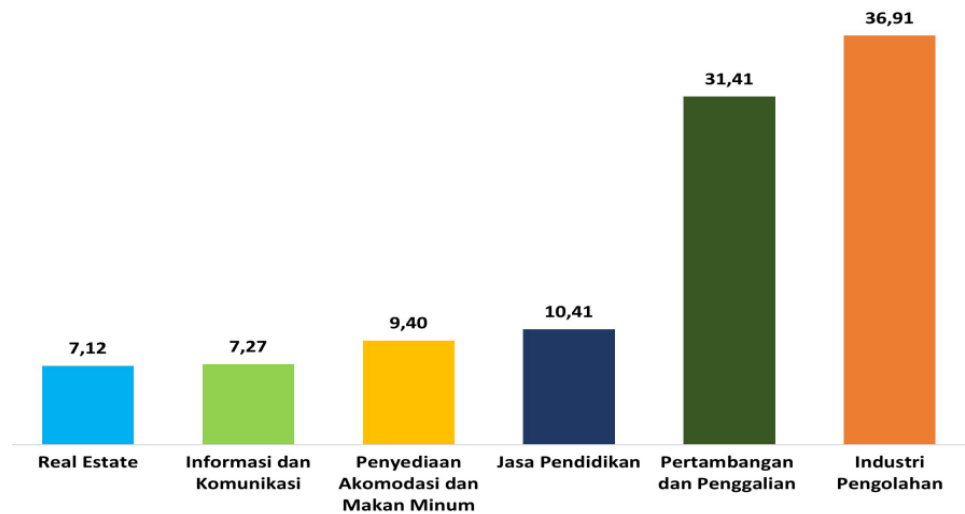
- Ekonomi Papua Barat Tahun 2024 tumbuh sebesar 20,80 Persen (C-to-C).

Gambar 2.5.1 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c)
(persen)



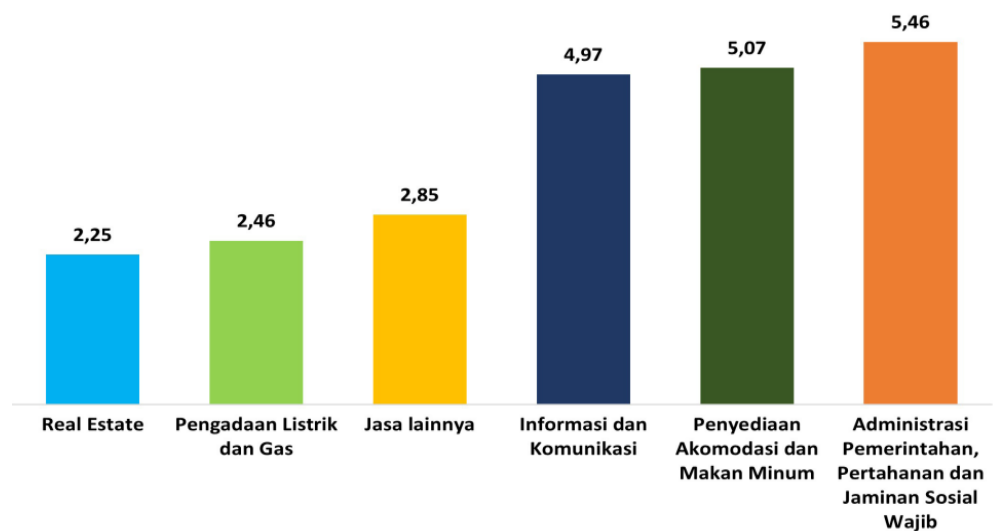
- Ekonomi Papua Barat Triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 22,11 persen (Y-on-Y).

Gambar 2.5.2 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-to-y)
(persen)



- Ekonomi Papua Barat Triwulan IV-2024 kontraksi sebesar 2,21 Persen (Q-to-Q).

Gambar 2.5.3 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q)
(persen)



- Perekonomian Papua Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai Rp76.177,48 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp49.486,23 miliar.

Tabel 2.5.4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, Atas Dasar Harga Konstan 2010, dan Distribusi Menurut Lapangan Usaha (Miliar rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku		Harga Konstan 2010		Distribusi	
		Triw IV 2024	2024	Triw IV 2024	2024	Triw IV 2024	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.304,94	5.124,21	828,53	3.310,73	6,56	6,73
B.	Pertambangan dan Penggalian	5.097,01	19.336,57	3.140,82	12.120,68	25,63	25,38
C.	Industri Pengolahan	7.836,58	29.652,80	5.664,70	21.425,31	39,41	38,93
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	8,21	31,62	4,41	17,50	0,04	0,04
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,64	52,22	9,92	39,16	0,07	0,07
F.	Konstruksi	1.552,13	6.009,44	833,12	3.262,72	7,81	7,89
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	922,89	3.588,85	557,12	2.173,73	4,64	4,71
H.	Transportasi dan Pergudangan	321,66	1.250,68	177,33	691,93	1,62	1,64
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	98,44	367,73	56,79	213,32	0,50	0,48
J.	Informasi dan Komunikasi	208,43	763,22	152,61	570,70	1,05	1,00
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	227,25	906,70	129,02	508,52	1,14	1,19
L.	Real Estat	183,61	689,66	117,91	455,47	0,92	0,91
M,N.	Jasa Perusahaan	12,40	47,29	7,97	30,88	0,06	0,06
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.718,28	6.865,68	907,82	3.575,22	8,64	9,01
P.	Jasa Pendidikan	238,09	926,42	183,66	710,27	1,20	1,22
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103,94	418,39	72,39	291,12	0,52	0,55
R,S,T,U	Jasa Lainnya	37,35	146,00	22,68	89,00	0,19	0,19
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		19.884,86	76.177,48	12.866,82	49.486,23	100,00	100,00

Tabel 2.5.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, Atas Dasar Harga Konstan 2010, dan Distribusi Menurut Pengeluaran (Miliar rupiah)

Komponen		Harga Berlaku		Harga Konstan 2010		Distribusi	
		Triw IV 2024	2024	Triw IV 2024	2024	Triw IV 2024	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.561,79	13.909,68	2.270,06	8.806,45	17,91	18,26
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	163,07	650,73	94,19	373,40	0,82	0,85
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.462,01	10.526,46	1.784,47	5.746,46	17,41	13,82
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.241,53	8.150,39	1.395,06	5.037,34	11,27	10,70
5.	Perubahan Inventori	-368,23	888,07	-473,24	366,13	-1,85	1,17
6.	Ekspor Barang dan Jasa	17.929,03	66.619,19	12.560,52	48.774,06	90,16	87,45
7.	Impor Barang dan Jasa	7.104,34	24.567,04	4.764,24	19.617,60	35,73	32,25
	Diskrepansi Statistik ¹⁾	0	0	0	0	0	0
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		19.884,86	76.177,48	12.866,82	49.486,23	100,00	100,00

Keterangan: 1) Selisih PDRB Lapangan Usaha dan PDRB Pengeluaran

- Ekonomi Papua Barat tahun 2024 tumbuh sebesar 20,80 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,18 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 32,90 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,10 persen.

Tabel 2.5.6 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Triw IV 2024 Terhadap Triw III 2024 (q-to-q)	Triw IV 2024 Terhadap Triw IV 2023 (y-on-y)	Laju Pertumbuhan 2024	Sumber Pertumbuhan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,56	-1,41	0,20	0,02
B. Pertambangan dan Penggalian	-5,56	31,41	29,78	6,79
C. Industri Pengolahan	-3,35	36,91	32,90	12,95
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,46	4,10	9,93	0,00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,56	-2,05	5,08	0,00
F. Konstruksi	1,71	1,30	-2,25	-0,18
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,88	2,36	5,48	0,28
H. Transportasi dan Pergudangan	7,18	0,64	2,01	0,03
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,07	9,40	4,72	0,02
J. Informasi dan Komunikasi	4,97	7,27	2,90	0,04
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,50	-6,55	-0,09	-0,00
L. Real Estat	2,25	7,12	5,96	0,06
M,N. Jasa Perusahaan	0,28	4,41	3,90	0,00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,46	0,53	8,55	0,69
P. Jasa Pendidikan	1,60	10,41	3,23	0,05
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,29	2,90	4,23	0,03
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2,85	1,45	6,99	0,01
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-2,21	22,11	20,80	20,80

Catatan: q-to-q: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
y-on-y: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya
c-to-c : PDRB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan triwulan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya

Tabel 2.5.7 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (persen)

Komponen		Triw IV 2024 Terhadap Triw III 2024 (q-to-q)	Triw IV 2024 Terhadap Triw IV 2023 (y-on-y)	Laju Pertumbuhan 2024	Sumber Pertumbuhan 2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,92	4,80	3,91	0,81
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPR	4,29	3,98	9,84	0,08
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15,78	-2,07	0,06	0,01
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,14	0,08	-2,56	-0,32
5.	Perubahan Inventori	-	-	-	-
6.	Ekspor Barang Jasa	-9,85	4,48	16,10	16,51
7.	Impor Barang Jasa	-15,89	-31,33	-7,95	-4,14
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		-2,21	22,11	20,80	20,80

Catatan: q-to-q: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
y-on-y: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya
c-to-c: PDRB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan triwulan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya

- Ekonomi Papua Barat triwulan IV-2024 terhadap triwulan IV-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 22,11 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 36,91 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 4,80 persen.
- Ekonomi Papua Barat triwulan IV-2024 terhadap triwulan III-2024 mengalami kontraksi sebesar 2,21 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,18 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 15,78 persen.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Papua Barat dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat

dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) **Inflasi Ringan** (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*galloping inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*high inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) **Hiperinflasi** (*hyper inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat (Berita Resmi Statistik No.01/01/91/Th.XIX, 02 Januari 2025, Inflasi dan Perkembangan Indeks Harga Konsumen Papua Barat sebagai berikut:

- Pada Desember 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Papua Barat sebesar 2,53 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,94.
- Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,33 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,53 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,20 persen; kelompok pendidikan sebesar 4,54 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,85 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,24 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,10 persen; kelompok transportasi sebesar 4,75 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,05 persen. Sedangkan kelompok yang tidak mengalami perubahan indeks adalah kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya.

- Tingkat inflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Provinsi Papua Barat bulan Desember 2024 masing-masing sebesar 0,34 persen dan 2,53 persen.

2.1.7 Struktur Perekonomian Provinsi Papua Barat

Struktur perekonomian Provinsi Papua Barat ditunjukkan melalui distribusi persentase nilai tambah atas dasar harga berlaku per sektor. PDRB dihitung menggunakan dua pendekatan yaitu PDRB pendekatan produksi/lapangan usaha dan PDRB pendekatan pengeluaran/penggunaan. Setiap pendekatan dihitung juga PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menggunakan harga berlaku saat PDRB dihitung (*current price*), sedangkan PDRB ADHK menggunakan harga pada suatu tahun yang disebut tahun dasar agar terbebas dari pengaruh inflasi. Tahun dasar yang digunakan dalam penghitungan PDRB ADHK adalah tahun 2010 (2010=100).

Tabel 2.7.1 PDRB Per Kapita Papua Barat

Komponen	2023	2024
(1)	(2)	(3)
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku		
- Nilai (Ribu Rupiah)	108.110,28	131.636,45
- Nilai (US\$)	7.094,99	8.305,55

2.2 Kebijakan Keuangan

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 tidak terdapat kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah Provinsi Papua Barat yang dapat berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca dan Arus Kas tahun 2024.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Pencapaian target kinerja APBD tahun anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SKPD	PENDAPATAN			BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	DINAS PENDIDIKAN	0	0	0,00%	187.928.445.726,00	166.184.721.659,00	88,43%
2	BOS	0	906.936.000,00	0,00%	0,00	906.596.660,00	0,00%
3	DINAS KESEHATAN	0	0	0,00%	102.292.006.267,00	83.336.331.488,00	81,47%
4	RSUD PROVINSI PAPUA BARAT	0	0	0,00%	70.822.194.724,00	56.360.033.715,00	79,58%
5	BLUD RSUD	25.000.000.000,00	24.002.232.034,53	95,19%	0,00	34.189.096.088,53	0,00%
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0	0	0,00%	731.636.341.598,00	645.252.287.718,00	88,19%
7	SATPOL POLISI PAMONG PRAJA	0	0	0,00%	37.999.383.034,00	33.267.404.991,00	87,55%
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0,00%	26.296.578.049,00	24.049.291.895,00	91,45%
9	DINAS SOSIAL	0	0	0,00%	31.912.292.621,00	27.306.096.716,00	85,57%
10	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	250.000.000,00	102.758.800,00	41,10%	29.455.061.914,00	24.652.975.981,00	83,70%
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	0	0,00%	20.276.975.585,00	18.635.471.950,00	91,90%
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	0	0,00%	22.468.467.416,97	20.822.999.653,00	92,68%
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	0	0	0,00%	39.162.760.039,00	31.249.753.973,00	79,79%
14	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENDATARAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	0	0	0,00%	13.722.341.755,00	11.789.722.782,00	85,92%
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	0	0	0,00%	26.838.865.594,00	24.660.456.367,00	91,88%
16	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	0,00%	74.369.995.793,00	55.881.810.891,00	75,14%
17	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK	0	0	0,00%	31.184.433.639,00	29.553.960.467,00	94,77%
18	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	0	0	0,00%	27.504.749.445,00	20.131.994.512,00	73,19%
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	0	0	0,00%	14.648.850.196,99	12.760.578.556,00	87,11%
20	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0	0	0,00%	101.248.569.052,00	98.041.201.866,00	96,83%
21	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	0	0	0,00%	20.718.533.809,00	17.534.034.818,00	84,63%
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0	0	0,00%	12.357.620.874,00	10.468.907.812,00	84,72%
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.426.010.063,00	1.124.909.650,00	25,42%	41.879.260.665,00	34.365.187.069,00	82,06%
24	BLUD KKP KAIMANA	800.000.000,00	2.536.823.457,00	317,10%	800.000.000,00	1.607.564.687,00	200,95%
25	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA	0	0	0,00%	60.088.871.057,00	53.940.819.107,00	89,77%

NO	SKPD	PENDAPATAN			BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
	DAN PERKEBUNAN						
26	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0	0	0,00%	20.084.766.911,00	17.504.584.078,00	87,15%
27	DINAS KEHUTANAN	0	0	0,00%	175.669.003.461,00	133.626.791.105,68	76,07%
28	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	0	1.600.000,00	0,00%	33.035.700.342,00	28.447.600.247,00	86,11%
29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	376.800.000,00	0,00%	24.984.601.329,00	21.834.444.436,00	87,39%
30	SEKRETARIAT DAERAH	975.624.036,00	0	0,00%	207.108.475.358,00	194.538.493.738,00	93,93%
31	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	0	0	0,00%	8.949.998.362,00	8.840.897.905,00	98,78%
32	BIRO HUKUM	0	0	0,00%	7.250.000.000,00	6.655.676.990,00	91,80%
33	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	0	0	0,00%	130.093.181.361,00	121.371.176.974,00	93,30%
34	BIRO PEREKONOMIAN	0	0	0,00%	5.549.990.066,00	5.545.147.985,00	99,91%
35	BIRO ORGANISASI	0	0	0,00%	3.646.183.463,00	3.293.555.707,00	90,33%
36	BIRO UMUM	0	458.356.043,00	0,00%	24.805.967.752,79	24.216.686.088,00	97,62%
37	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	0	0	0,00%	5.153.819.599,00	5.123.419.821,00	99,41%
38	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	0	0	0,00%	7.000.000.000,00	6.920.238.844,00	98,86%
39	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0	0	0,00%	5.229.165.019,00	5.143.057.492,00	98,35%
40	BIRO PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS	0	0	0,00%	11.954.843.490,00	11.816.743.721,00	98,84%
41	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT	0	0	0,00%	117.611.992.746,00	98.944.794.710,00	84,13%
42	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	0	0	0,00%	60.189.723.167,00	47.522.001.170,00	78,95%
43	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	0	0,00%	35.497.276.165,00	32.715.976.677,00	92,16%
44	BADAN PENDAPATAN DAERAH	399.986.411.028,00	276.483.894.448,00	69,12%	54.095.651.015,00	45.545.002.880,00	84,19%
45	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.502.056.648.568,78	4.180.913.076.372,54	92,87%	2.058.651.169.699,45	1.794.169.041.654,75	87,15%
46	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	0	0,00%	27.069.489.277,00	24.481.475.706,00	90,44%
47	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	0	0	0,00%	13.481.330.217,00	11.553.812.482,00	85,70%
48	BLUD BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	18.416.995.000,00	5.319.718.862,00	28,88%	18.416.995.000,00	9.011.918.700,00	48,93%
49	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	0	0,00%	10.851.331.458,00	10.107.984.171,00	93,15%
50	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	0	0	0,00%	13.445.399.804,00	12.464.585.049,00	92,71%
51	INSPEKTORAT	0	0	0,00%	41.643.794.865,00	36.556.117.328,00	87,78%
52	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0,00%	478.127.647.262,00	471.039.650.297,00	98,52%
	TOTAL	4.951.911.688.695,78	4.492.227.105.667,07	90,71%	5.325.210.096.043,20	4.725.940.177.377,96	88,75%

BAB III IKHTISAR DAN HAMBATAN CAPAIAN KINERJA

3.1. Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Barat diklasifikasikan menurut urusan menjadi 7 (tujuh) urusan pemerintahan dan 47 (empat puluh tujuh) perangkat daerah. Guna memudahkan dalam penelusuran antara realisasi dan target anggaran, penyajian ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan belum disajikan berdasarkan urusan. Ikhtisar realisasi dimaksud adalah sebagaimana disajikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi belanja.

Realisasi Pendapatan Menurut Urusan Pemerintahan Berdasarkan Klasifikasi Per Organisasi

NO	URUSAN/SKPD	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI (Rp)	(%)	LEBIH/ KURANG
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25.000.000.000,00	24.909.168.034,53	99,64%	(90.831.965,47)
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	BOS	0,00	906.936.000,00	0,00%	906.936.000,00
3	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	RSUD Provinsi Papua Barat	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	BLUD RSUD Provinsi Papua Barat	25.000.000.000,00	24.002.232.034,53		(997.767.965,47)
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00%	0,00
9	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00%	0,00
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	250.000.000,00	102.758.800,00	41,10%	(147.241.200,00)
1	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	250.000.000,00	102.758.800,00	41,10%	(147.241.200,00)
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Dinas Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00%	0,00
8	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	0,00	0,00	0,00%	0,00
9	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00%	0,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan	0,00	0,00	0,00%	0,00
11	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00%	0,00
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00%	0,00
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00%	0,00
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5.226.010.063,00	4.040.133.107,00	77,31%	(1.185.876.956,00)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.426.010.063,00	1.124.909.650,00	25,42%	(3.301.100.413,00)
2	BLUD KKP Fakfak dan Kaimana	800.000.000,00	2.536.823.457,00	317,10%	1.736.823.457,00
3	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Dinas Kehutanan	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	1.600.000,00	0,00%	1.600.000,00
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	376.800.000,00	0,00%	376.800.000,00
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	975.624.036,00	458.356.043,00	46,98%	(517.267.993,00)
1	Sekretariat Daerah	975.624.036,00	458.356.043,00	46,98%	(517.267.993,00)
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat	0,00	0,00	0,00%	0,00
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.920.460.054.596,78	4.462.716.689.682,54	90,70%	(457.743.364.914,24)
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	399.986.411.028,00	276.483.894.448,00	69,12%	(123.502.516.580,00)
3	Badan Pendapatan Daerah	4.502.056.648.568,78	4.180.913.076.372,54	92,87%	(321.143.572.196,24)
4	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	18.416.995.000,00	5.319.718.862,00	0,00%	(13.097.276.138,00)
6	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	Badan Penghubung Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	0,00%	0,00
1	Inspektorat	0,00	0,00	0,00%	0,00
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	0,00%	0,00
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00%	0,00
TOTAL		4.951.911.688.695,78	4.492.227.105.667,07	90,72%	(459.684.583.028,71)

Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Klasifikasi Per Bidang

NO	URUSAN/SKPD	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI (Rp)	(%)	LEBIH/KURANG
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.188.887.242.019,00	1.070.851.860.930,53	90,07%	(118.035.381.088,47)
1	Dinas Pendidikan	187.928.445.726,00	166.184.721.659,00	88,43%	(21.743.724.067,00)
2	BOS	0,00	906.596.660,00	0,00%	906.596.660,00
3	Dinas Kesehatan	102.292.006.267,00	83.336.331.488,00	81,47%	(18.955.674.779,00)
4	RSUD Provinsi Papua Barat	70.822.194.724,00	56.360.033.715,00	79,58%	(14.462.161.009,00)
5	BLUD RSUD Provinsi Papua Barat	0,00	34.189.096.088,53	0,00%	34.189.096.088,53
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	731.636.341.598,00	645.252.287.718,00	88,19%	(86.384.053.880,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	37.999.383.034,00	33.267.404.991,00	87,55%	(4.731.978.043,00)
8	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi	26.296.578.049,00	24.049.291.895,00	91,45%	(2.247.286.154,00)
9	Dinas Sosial	31.912.292.621,00	27.306.096.716,00	85,57%	(4.606.195.905,00)
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	433.957.225.111,00	376.183.869.628,00	86,69%	(57.773.355.483,00)
1	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	29.455.061.914,00	24.652.975.981,00	83,70%	(4.802.085.933,00)
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20.276.975.585,00	18.635.471.950,00	91,90%	(1.641.503.635,00)
3	Dinas Ketahanan Pangan	22.468.467.416,00	20.822.999.653,00	92,68%	(1.645.467.763,00)
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	39.162.760.039,00	31.249.753.973,00	79,79%	(7.913.006.066,00)
5	Dinas Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.722.341.755,00	11.789.722.782,00	85,92%	(1.932.618.973,00)
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	26.838.865.594,00	24.660.456.367,00	91,88%	(2.178.409.227,00)
7	Dinas Perhubungan	74.369.995.793,00	55.881.810.891,00	75,14%	(18.488.184.902,00)
8	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	31.184.433.639,00	29.553.960.467,00	94,77%	(1.630.473.172,00)
9	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	27.504.749.445,00	20.131.994.512,00	73,19%	(7.372.754.933,00)
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	14.648.850.196,00	12.760.578.556,00	87,11%	(1.888.271.640,00)
11	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	101.248.569.052,00	98.041.201.866,00	96,83%	(3.207.367.186,00)
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	20.718.533.809,00	17.534.034.818,00	84,63%	(3.184.498.991,00)
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.357.620.874,00	10.468.907.812,00	84,72%	(1.888.713.062,00)
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	356.542.203.765,00	291.326.990.729,68	81,71%	(65.215.213.035,32)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	41.879.260.665,00	34.365.187.069,00	82,06%	(7.514.073.596,00)
2	BLUD KKP Fakfak dan Kaimana	800.000.000,00	1.607.564.687,00	200,95%	807.564.687,00
3	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	60.088.871.057,00	53.940.819.107,00	89,77%	(6.148.051.950,00)
4	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	20.084.766.911,00	17.504.584.078,00	87,15%	(2.580.182.833,00)
5	Dinas Kehutanan	175.669.003.461,00	133.626.791.105,68	76,07%	(42.042.212.355,32)
6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	33.035.700.342,00	28.447.600.247,00	86,11%	(4.588.100.095,00)
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	24.984.601.329,00	21.834.444.436,00	87,39%	(3.150.156.893,00)
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	594.543.340.383,00	539.931.891.145,00	90,81%	(54.611.449.238,00)
1	Sekretariat Daerah	416.741.624.470,00	393.465.095.265,00	94,41%	(23.276.529.205,00)
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat	117.611.992.746,00	98.944.794.710,00	84,13%	(18.667.198.036,00)
3	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat	60.189.723.167,00	47.522.001.170,00	78,95%	(12.667.721.997,00)
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.231.508.642.638,20	1.940.049.797.319,75	86,94%	(291.458.845.318,45)
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	35.497.276.165,00	32.715.976.677,00	92,16%	(2.781.299.488,00)
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	54.095.651.018,20	45.545.002.880,00	84,19%	(8.550.648.138,20)
3	Badan Pendapatan Daerah	2.058.651.169.699,00	1.794.169.041.654,75	87,15%	(264.482.128.044,25)
4	Badan Kepegawaian Daerah	27.069.489.277,00	24.481.475.706,00	90,44%	(2.588.013.571,00)
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	13.481.330.217,00	11.553.812.482,00	85,70%	(1.927.517.735,00)
6	BLUD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	18.416.995.000,00	9.011.918.700,00		
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.851.331.458,00	10.107.984.171,00	93,15%	(743.347.287,00)
8	Badan Penghubung Daerah	13.445.399.804,00	12.464.585.049,00	92,71%	(980.814.755,00)
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	41.643.794.865,00	36.556.117.328,00	87,78%	(5.087.677.537,00)
1	Inspektorat	41.643.794.865,00	36.556.117.328,00	87,78%	(5.087.677.537,00)
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	478.127.647.262,00	471.039.650.297,00	98,52%	(7.087.996.965,00)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	478.127.647.262,00	471.039.650.297,00	98,52%	(7.087.996.965,00)
TOTAL		5.325.210.096.043,20	4.725.940.177.377,96	88,75%	(599.269.918.665,24)

3.2. Pencapaian Program Pemerintah Daerah terkait *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20%. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Disamping itu, Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjelaskan dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah.
2. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah selain belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Berikut disajikan tingkat pemenuhan alokasi anggaran *mandatory spending* pada Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2024 :

1. Alokasi Pendidikan Sebesar 20%
Pada TA. 2024, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menganggarkan alokasi untuk fungsi pendidikan senilai Rp862.856.385.364,00. Apabila dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah senilai Rp5.325.210.096.043,20 maka rasio alokasi anggaran pendidikan terhadap total belanja daerah adalah sebesar 16,20%. Alokasi tersebut dibawah alokasi anggaran yang diamanatkan peraturan perundangan yaitu sebesar 20% untuk fungsi pendidikan. Realisasi alokasi pendidikan pada TA. 2024 sebesar Rp827.933.442.377,35 atau 95,95% bila dibandingkan dengan jumlah yang dianggarkan sebesar Rp862.856.385.364,00.
2. Alokasi Infrastruktur Pelayanan Publik Sebesar 40%
Pada TA. 2024, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menganggarkan alokasi untuk infrastruktur pelayanan publik senilai Rp1.004.682.038.518,81. Apabila dibandingkan dengan jumlah Total Belanja Daerah Rp5.325.210.096.043,20 setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer Kepala Daerah dan atau Desa senilai Rp1.834.905.087.841,00 maka rasio alokasi anggaran infrastruktur pelayanan publik terhadap sebesar 28,78%. Alokasi tersebut dibawah alokasi anggaran yang diamanatkan peraturan perundangan yaitu sebesar 40% untuk infrastruktur pelayanan

publik. Realisasi alokasi Infrastruktur Pelayanan Publik pada TA. 2024 sebesar Rp 908.268.577.249,88 atau 90,40% bila dibandingkan dengan jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.004.682.038.518,81.

3.3. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Yang menjadi hambatan atau kendala dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan-perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan.
- 2) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan.
- 3) Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan teknis kegiatan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat yang berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan kepada publik dengan dukungan oleh entitas akuntansi. Produk dari entitas pelaporan ini adalah laporan keuangan konsolidasi berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Kepala SKPD sebagai penanggung jawab entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada pejabat yang melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan di lingkungannya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD) untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Jumlah entitas akuntansi terdiri dari 1 (satu) PPKD dan 47 (empat puluh tujuh) SKPD di lingkungan Provinsi Papua Barat yang meliputi Sekretariat Daerah beserta Biro-biro, Sekretariat Badan, Sekretariat DPR, Sekretariat MRPB, Dinas-Dinas, Badan dan Kantor.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015 menerapkan standar akuntansi berbasis akrual pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan

perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

4.3.1 Pendapatan LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD (perlakuan akhir tahun).
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD (BLUD).
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan hingga tanggal pelaporan belum dipertanggungjawabkan/dimintakan penggantian dari RKUD, dengan ketentuan Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD (khusus BLUD).
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.3 Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja.

4.3.4 Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

4.3.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset :

a. Persediaan

Persediaan diakui:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan diakui sebagai:

- a. Aset, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan.
- b. Beban, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.

Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik (*periodic method*) berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, perputarannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi.

Metode periodik adalah metode pencatatan persediaan dimana nilai persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Dengan metode periodik ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

Harga pembelian terakhir adalah harga persediaan yang dijadikan dasar pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali.

Metode sistematis FIFO (*First In First Out*) adalah metode pengukuran nilai persediaan dimana persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang digunakan.

Metode FIFO ini memungkinkan harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Pengungkapan untuk persediaan di dalam Laporan Keuangan, antara lain:

- a. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan,
- b. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

b. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

d. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

f. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

g. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- 2) Biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi :
 - a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

4.3.6 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dengan nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat dikelompokkan sebagai: utang kepada pihak ketiga; utang bunga; utang perhitungan kepada pihak ketiga dan bagian lancar utang jangka panjang.

4.3.7 Pendapatan Lo

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. (PSAP 12 paragraf 8).4. Pendapatan-LO dapat diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yang diyakini dapat direalisasikan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

- a. Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas

Dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.

- b. Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas

Dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan.

- c. Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas

Dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

4.3.8 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dapat diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- b. Terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas

Dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk

pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

Dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

c. Beban diakui setelah pengeluaran kas

Dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

4.3.9 Kapitalisasi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. 67. Batasan jumlah pengeluaran yang dapat dikapitalisasi (capitalization thresholds) ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya, namun harus diterapkan secara konsisten. (PSAP 07 paragraf 49).

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

- a. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga, hewan yang sama dengan atau lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),
- b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, dengan kata lain setiap penambahan Rp1,00 (satu rupiah) terhadap aset tetap sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan kapitalisasi, dan
- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan Jalan dan Jembatan sama dengan atau melebihi dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap:

- a. Pengadaan tanah;
- b. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai;
- c. Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan;
- d. Pembangunan gedung dan bangunan;
- e. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan;
- f. Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai; dan
- g. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.

BAB V
PENJELASAN POS-POS
LAPORAN KEUANGAN

5.1 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

5.1.1 PENDAPATAN

Realisasi pendapatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp4.492.227.105.667,07 atau 90,72% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.951.911.688.695,78 , dengan rincian penerimaan pendapatan sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% DARI	
	(Rp)	(Rp)	ANGGARAN	TOTAL
PENDAPATAN ASLI DAERAH	532.315.579.108,00	405.012.832.037,07	76,09	9,02
PENDAPATAN TRANSFER	4.417.922.458.587,78	4.086.014.509.630,00	92,49	90,96
LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	1.673.651.000,00	1.199.764.000,00	71,69	0,03
J U M L A H	4.951.911.688.695,78	4.492.227.105.667,07	90,72	100,00

Realisasi pendapatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp4.492.227.105.667,07 atau 105,42% dari realisasi pendapatan tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.261.210.554.290,91, dengan rincian penerimaan pendapatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	TA 2024		2023	%
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	532.315.579.108,00	405.012.832.037,07	570.268.533.820,91	71,02
2	PENDAPATAN TRANSFER	4.417.922.458.587,78	4.086.014.509.630,00	3.689.287.962.470,00	110,75
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	1.673.651.000,00	1.199.764.000,00	1.654.058.000,00	72,53
	J U M L A H	4.951.911.688.695,78	4.492.227.105.667,07	4.261.210.554.290,91	105,42

Penjelasan atas keseluruhan pendapatan diatas secara rinci dijelaskan berikut ini:

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp405.012.832.037,07 atau 76,09% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp532.315.579.108,00, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% DARI	
		(Rp)	(Rp)	ANGGARAN	TOTAL
1	Pendapatan Pajak Daerah	394.312.210.028,00	272.218.921.223,00	69,04	67,21
2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.652.184.099,00	1.693.624.493,00	29,96	0,42
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.451.453.512,00	37.152.976.644,00	118,13	9,17
4	Lain-lain PAD Yang Sah	100.899.731.469,00	93.947.309.677,07	93,11	23,20
J U M L A H		532.315.579.108,00	405.012.832.037,07	76,09	100,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah mencapai 69,04% atau sebesar Rp272.218.921.223,00 merupakan pendapatan dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	72.109.581.250,00
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	46.650.339.700,00
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	107.198.922.674,00
- Pajak Air Permukaan	2.464.657.496,00
- Pajak Rokok	43.795.420.103,00
Jumlah	272.218.921.223,00

Pendapatan Retribusi Daerah mencapai 29,96% atau sebesar Rp1.693.624.493,00 diperoleh dari:

- Retribusi Jasa Umum	0,00
- Retribusi Jasa Usaha	1.558.191.693,00
- Retribusi Perizinan Tertentu	135.432.800,00
Jumlah	1.693.624.493,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mencapai 118,13% atau Rp37.152.976.644,00 diperoleh dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yaitu

- PT. Bank Pembangunan Daerah Papua	37.152.976.644,00
- PT. Papua Doberai Mandiri	0,00
Jumlah	37.152.976.644,00

Lain-lain Penerimaan PAD yang Sah mencapai 92,91% atau sebesar Rp93.743.309.677,07 diperoleh dari:

- Jasa Giro	15.580.697.332,00
- Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	29.559.961.782,51
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	13.900.176.009,03
- Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.047.700.200,00
- Pendapatan BOS/BLUD	31.858.774.353,53
JUMLAH	93.947.309.677,07

b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp4.086.014.509.630,00 atau 92,49% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.417.922.458.587,78 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% DARI	
		(Rp)	(Rp)	ANGGARAN	TOTAL
1	Dana Perimbangan	3.574.031.636.587,78	3.242.123.687.630,00	90,71	79,35
2	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	843.890.822.000,00	843.890.822.000,00	100,00	20,65
J U M L A H		4.417.922.458.587,78	4.086.014.509.630,00	92,49	100,00

Realisasi Pendapatan Transfer sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp4.086.014.509.630,00 atau 110,75% dari realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp3,689,287,962,470.00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	TA 2024		2023	%
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI	
1	Dana Perimbangan	3.574.031.636.587,78	3.242.123.687.630,00	2.677.345.716.470,00	121,09
2	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	843.890.822.000,00	843.890.822.000,00	1.011.942.246.000,00	83,39
J U M L A H		4.417.922.458.587,78	4.086.014.509.630,00	3.689.287.962.470,00	110,75

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp3.242.123.687.630,00 atau 90,71% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.3.574.031.636.587,78

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp3.242.123.687.630,00 atau 121,09% dari realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.677.345.716.470,00.

Realisasi tahun 2024 tersebut terdiri dari:

Dana Perimbangan	3.242.123.687.630,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	2.589.423.132.734,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	574.755.164.465,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	73.659.465.202,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	4.285.925.229,00
JUMLAH	3.242.123.687.630,00

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp843.890.822.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp843.890.822.000,00.

Realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp843.890.822.000,00 atau 83,39% dari realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.011.942.246.000,00 . Realisasi tahun 2024 tersebut terdiri dari:

Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	843.890.822.000,00
Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat	334.678.000.000,00
Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	509.212.822.000,00
JUMLAH	843.890.822.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 adalah Pendapatan Hibah sebesar Rp1.199.764.000,00 atau 71,69% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.673.651.000,00,00.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.199.764.000,00 atau 72,53% dari realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp 1.654.058.000,00 Realisasi tahun 2024 tersebut dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri yaitu PT. Jasa Raharja sebesar Rp1.199.764.000,00.

5.1.2 BELANJA

Realisasi belanja sampai akhir tahun anggaran 2024 sebesar Rp3.005.655.662.500,96 atau 86,11% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp3.490.305.008.202,20 , dengan rincian belanja sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% DARI	
		(Rp)	(Rp)	ANGGARAN	TOTAL
1	BELANJA OPERASI	2.634.963.741.500,85	2.276.237.330.888,28	86,39	75,73
2	BELANJA MODAL	815.463.306.223,35	722.518.523.410,68	88,60	24,04
3	BELANJA TAK TERDUGA	39.877.960.478,00	6.899.808.202,00	17,30	0,23
	JUMLAH	3.490.305.008.202,20	3.005.655.662.500,96	86,11	100,00

Realisasi belanja sampai akhir tahun anggaran 2024 sebesar Rp3.005.655.662.500,96 atau 88,02% dari realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.414.702.634.920,82, dengan rincian belanja sebagai berikut:

NO	URAIAN	TA 2024		2023	%
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI	
1	BELANJA OPERASI	2.634.963.741.500,85	2.276.237.330.888,28	2.361.004.303.533,82	96,41
2	BELANJA MODAL	815.463.306.223,35	722.518.523.410,68	1.046.163.331.387,00	69,06
3	BELANJA TAK TERDUGA	39.877.960.478,00	6.899.808.202,00	7.535.000.000,00	91,57
	JUMLAH	3.490.305.008.202,20	3.005.655.662.500,96	3.414.702.634.920,82	88,02

a. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengurangan ekuitas pemerintah daerah yang digunakan untuk kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintahan. Realisasi Belanja Operasi sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp2.276.237.330.888,28 atau 86,39% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp 2.361.004.303.533,82.

NO	URAIAN	TA 2024		2023	%
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI	
1	Belanja Pegawai	762.551.285.589,29	505.462.106.906,53	523.279.966.306,39	96,59
2	Belanja Barang dan Jasa	1.108.056.005.789,36	1.040.285.188.393,75	1.175.581.257.267,43	88,49
3	Belanja Hibah	758.978.115.990,20	726.297.201.588,00	657.763.610.160,00	110,42
4	Belanja Bantuan Sosial	5.378.334.132,00	4.192.834.000,00	4.379.469.800,00	95,74
J U M L A H		2.634.963.741.500,85	2.276.237.330.888,28	2.361.004.303.533,82	96,41

Penjelasan masing-masing realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk gaji dan tunjangan serta honor pegawai pemerintah daerah. Realisasi belanja tersebut sebesar Rp505.462.106.906,53 atau 66,29% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp762.551.285.589,29. Realisasi belanja tersebut sebesar Rp505.462.106.906,53 atau 96,59% dari realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp523.294.543.306,39.

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% DARI	
				ANGGARAN	TOTAL
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	351.927.097.989,23	223.797.762.569,00	63,59	44,28
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	314.278.210.929,00	199.625.175.376,00	63,52	39,49
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	30.241.950.764,16	25.126.802.626,00	83,09	4,97
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	46.753.931.052,00	40.013.831.513,00	85,58	7,92
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	945.143.700,00	-	-	-
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.489.600.000,00	1.289.230.666,00	86,55	0,26
7	Belanja Gaji dan Tunjangan MRP	16.860.101.154,00	14.697.808.627,00	87,18	2,91
8	Belanja Pegawai BOS	55.250.000,00	52.200.000,00	94,48	0,01
9	Belanja Pegawai BLUD	-	859.295.529,53	-	0,17
J U M L A H		762.551.285.588,39	505.462.106.906,53	66,29	100,00

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang adalah pengeluaran pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang terdiri atas belanja barang atau jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan. Realisasi belanja tersebut dalam tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.040.285.188.393,75 atau 93,88% dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp1.108.056.005.789,36. Realisasi belanja tersebut dalam tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.040.285.188.393,75 atau 88,49% dari realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.175.581.257.267,43.

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% DARI	
		(Rp)	(Rp)	ANGGARAN	TOTAL
1	Belanja Barang	371.438.809.817,28	353.715.802.850,75	95,23	34,00
2	Belanja Jasa	364.525.316.076,97	327.813.064.798,00	89,93	31,51
3	Belanja Pemeliharaan	50.367.285.353,26	46.898.606.897,00	93,11	4,51
4	Belanja Perjalanan Dinas	286.081.115.387,00	264.027.563.836,00	92,29	25,38
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.510.000.000,00	4.736.400.000,00		
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	174.750.000,00	743.807.634,00	425,64	0,07
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.958.729.154,85	42.349.942.378,00	141,36	4,07
J U M L A H		1.108.056.005.789,36	1.040.285.188.393,75	93,88	100,00

3. Belanja Hibah

Belanja hibah adalah pengeluaran pemerintah daerah yang berupa uang tunai, barang dan atau jasa yang diberikan kepada perorangan, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus. Uang dan barang yang diberikan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Pada tahun anggaran 2024 pemerintah daerah mengeluarkan belanja hibah sebesar Rp726.297.201.558,00 atau 95,69% dari anggarannya yang ditetapkan sebesar Rp758.978.115.990,20. Belanja hibah dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% DARI	
		(Rp)	(Rp)	ANGGARAN	TOTAL
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	17.218.488.500,00	2.395.674.406,00	13,91%	0,33%
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	9.930.980.308,00	9.719.035.000,00	97,87%	1,34%
3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	729.164.969.059,20	711.925.537.958,00	97,64%	98,02%
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.663.678.123,00	2.256.954.224,00	84,73%	0,31%
Jumlah		758.978.115.990,20	726.297.201.588,00	95,69%	100,00%

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran pemerintah daerah yang ditujukan untuk membantu peningkatan aktivitas kegiatan serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, seperti bantuan kepada organisasi masyarakat, organisasi adat dan agama, serta bantuan kepada nelayan. Realisasi belanja bantuan sosial dalam tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.192.834.000,00 atau 77,96% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.378.334.132,00. Belanja bantuan sosial dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% DARI ANGGARAN	TOTAL
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.467.000.000,00	2.383.500.000,00	68,75%	56,85%
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	84.675.000,00	84.675.000,00	100,00%	2,02%
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	863.659.132,00	763.659.000,00	88,42%	18,21%
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	963.000.000,00	961.000.000,00	99,79%	22,92%
Jumlah		5.378.334.132,00	4.192.834.000,00	77,96%	100,00%

b. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengurangan ekuitas pemerintah daerah yang digunakan untuk biaya antara lain konstruksi dan peralatan. Belanja modal sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 dapat terserap sebesar Rp722.518.523.410,68 atau 88,60% dari belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp815.463.306.223,35 , dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% DARI ANGGARAN	TOTAL
1	Belanja Modal Tanah	12.513.268.604,00	10.892.907.624,00	87,05%	1,51%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.146.024.182,47	60.367.108.642,33	100,37%	8,36%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166.769.003.663,88	135.074.382.076,35	80,99%	18,69%
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	575.909.469.773,00	516.058.585.068,00	89,61%	71,42%
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6	Belanja Modal Aset Lainnya	125.540.000,00	125.540.000,00	100,00%	0,02%
Jumlah		815.463.306.223,35	722.518.523.410,68	88,60%	100,00%

Belanja modal sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 dapat terserap sebesar Rp722.518.523.410,68 atau 69,06% dari realisasi belanja modal tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.046.163.331.387,00 , dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%
1	Belanja Tanah	10.892.907.624,00	2.799.200.000,00	389,14
2	Belanja Peralatan dan Mesin	60.367.108.642,33	147.174.589.987,00	41,02
3	Belanja Bangunan dan Gedung	135.074.382.076,35	202.373.171.886,00	66,75
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	516.058.585.068,00	691.609.472.599,00	74,62
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	1.779.698.915,00	0,00
6	Belanja Aset Lainnya	125.540.000,00	427.198.000,00	0,00
J U M L A H		722.518.523.410,68	1.046.163.331.387,00	69,06

c. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga adalah pengurangan ekuitas pemerintah daerah yang digunakan untuk mengatasi keadaan darurat. Belanja tak terduga sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 sebesar Rp6.899.808.202,00 atau 17,30% terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp39.877.960.478,00.

5.1.3 TRANSFER

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Realisasi Transfer di tahun anggaran 2024 yang besaran ditetapkan dalam surat keputusan gubernur sebesar Rp1.720.284.514.877,00 atau 93,75% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.834.905.087.841,00. Transfer yang dimaksud adalah transfer keluar yang terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan.

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
			JUMLAH	%
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	290.324.470.976,00	192.290.287.556,00	66,23%
2	Transfer Bantuan Keuangan	1.544.580.616.865,00	1.527.994.227.321,00	98,93%
JUMLAH		1.834.905.087.841,00	1.720.284.514.877,00	93,75%

Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu pemerintah daerah ke pemerintahan daerah yang lebih rendah. Transfer Bagi Hasil Pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
			JUMLAH	%
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	272.264.204.425,00	174.876.831.138,00	64,23%
2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	18.060.266.551,00	17.413.456.418,00	96,42%
JUMLAH		290.324.470.976,00	192.290.287.556,00	66,23%

Transfer Bagi Hasil Pendapatan pada tahun 2024 meliputi :

NO	BAGI HASIL	PERIODE	DASAR	JUMLAH	TOTAL
1	Pajak Daerah PKB, BBN-KB, PBB-KB	TW IV Okt s.d. Des 2023	SK Gubernur Papua Barat Nomor 92 Tahun 2024	39.078.202.236,00	161.633.493.485,00
		TW I 2024	SK Gubernur Papua Barat Nomor 146 Tahun 2024	27.320.721.568,00	
		TW II 2024	900.1.14.3/198/9/2023	50.300.491.633,00	
		TW III 2024	SK Gubernur Papua Barat Nomor 307 Tahun 2024	44.934.078.048,00	
2	Pajak Rokok	TW I Januari s.d. Maret 2024	SK Gubernur Papua Barat Nomor 110 Tahun 2024	12.040.856.861,00	30.656.794.071,00
		TW II 2024	SK Gubernur Papua Barat Nomor 167 Tahun 2024	6.357.871.495,00	
		TW III 2024	SK Gubernur Papua Barat Nomor 252 Tahun 2024	7.332.974.912,00	
		TW IV Okt s.d. Nov 2024	Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 326 Tahun 2024	4.925.090.803,00	
Jumlah				192.290.287.556,00	192.290.287.556,00

Transfer Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Transfer Bantuan Keuangan pada tahun 2024 meliputi :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
			JUMLAH	%
1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi	39.072.461.000,00	22.486.071.456,00	57,55%
2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00%
3	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	1.455.508.155.865,00	1.455.508.155.865,00	100,00%
JUMLAH		1.544.580.616.865,00	1.527.994.227.321,00	98,93%

Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi adalah bantuan keuangan yang diberikan ke Provinsi Papua Barat Daya yang meliputi:

NO	BANTUAN KEUANGAN	PERIODE	DASAR	JUMLAH	TOTAL
1	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	TW I 2024	SK Gubernur Papua Barat Nomor 114 Tahun 2024	21.823.031.488,00	22.486.071.456,00
		1 April s/d 14 Juni 2024	SK Gubernur Papua Barat Nomor 209 Tahun 2024	663.039.968,00	
2	Pajak Rokok			-	-
J u m l a h				22.486.071.456,00	22.486.071.456,00

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota adalah bantuan keuangan yang diberikan ke Kabupaten Manokwari dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional sebesar Rp50.000.000.000,00.

Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota

NO	BANTUAN KEUANGAN	PERIODE	DASAR	JUMLAH	TOTAL
1	Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	Kurang Bayar Tahap II	SK Gubernur Papua Barat No. 30 Tahun 2024	52.753.289.431,00	203.292.217.321,00
		TW IV Tahap II 2023	SK Gubernur Papua Barat No. 105 Tahun 2024	11.749.079.156,00	
		TW I 2024	SK Gubernur Papua Barat No. 105	27.757.969.747,00	
		TW II & III 2024	Keputusan Gubernur Papua Barat No. 213 Tahun 2024	83.273.909.240,00	
		TW IV 2024	Keputusan Gubernur Papua Barat No. 292 Tahun 2024	27.757.969.747,00	
2	Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	Kurang Bayar Tahap IV	SK Gubernur Papua Barat No. 30 Tahun 2024	535.022.351.393,00	1.252.215.938.544,00
		TW I 2024	SK Gubernur Papua Barat No. 105 Tahun 2024	133.719.488.822,00	
		TW II & III 2024	Keputusan Gubernur Papua Barat No. 213 Tahun 2024	437.605.573.747,00	
		TW IV 2023	Keputusan Gubernur Papua Barat No. 292 Tahun 2024	145.868.524.582,00	
J u m l a h				1.455.508.155.865,00	1.455.508.155.865,00

Total realisasi pendapatan tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.492.227.105.667,07 dikurangi realisasi belanja tahun anggaran 2024 sebesar Rp3.005.655.662.500,96

dan realisasi transfer tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.720.284.514.877,00 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp233.713.071.710,89.

5.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan Daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Realisasi penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2024 merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp367.655.057.876,83.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Realisasi pengeluaran pembiayaan merupakan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah kepada Bank Papua sebesar Rp0,00.

Realisasi penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2024 sebesar Rp367.655.057.876,83 dikurangi Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2023 sebesar Rp0,00 sehingga Pembiayaan Netto per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp367.655.057.876,83.

5.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp133.941.986.165,94. Dengan perhitungan selisih antara defisit anggaran sebesar Rp233.713.071.710,89 dengan Pembiayaan Netto per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp367.655.057.876,83.

Bila dibandingkan SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp133.941.986.165,94 dengan Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp133.420.112.434,94, terdapat selisih sebesar Rp521.873.731,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	SKPD
	Koreksi atas lebih catat pencatatan Pajak Jasa		
1	Giro bulan Maret s.d Oktober yang telah dipulihkan senilai Rp36.440.214,00	36.440.214,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Koreksi atas lebih catat pencatatan Pajak Jasa		
2	Giro bulan November dan Desember yang belum dipulihkan senilai Rp9.208.592,00	9.208.592,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Terdapat SP2D cair ganda		
3	BAPPEDA:92.00/04.0/000180/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/M/8/2024	30.130.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Terdapat SP2D cair ganda		
4	BPKAD:92.00/04.0/000750/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	326.116.890,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Terdapat SP2D cair ganda		
5	BAPPEDA:92.00/04.0/000243/GU/5.01.0.00.0.0.01.0000/P4/10/2024	15.504.580,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Terdapat SP2D cair ganda Dinas		
6	PUPR:92.00/04.0/000602/LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/P4/10/2024/BEARLAND KONSULTAN CV	73.011.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Lebih		
7	Cair:992.00/04.0/000022/GU/3.27.0.00.0.00.02.0000/M/4/2024	180.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Lebih		DINAS PENANAMAN MODAL
8	Cair:92.00/04.0/000034/GU/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024	2.000.000,00	DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Lebih		
9	Cair:92.00/04.0/000121/GU/6.01.0.00.0.00.01.0000/P4/10/2024	9.000,00	INSPEKTORAT
	Lebih		
10	Cair:92.00/04.0/000123/GU/1.05.0.00.0.00.02.0000/P4/10/2024	9.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Lebih		
11	Cair:92.00/04.0/000079/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024	3,00	BIRO PEREKONOMIAN
12	Setoran temuan yang seharusnya di kredit tetapi di debet oleh Bank Papua di RKUD	300.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat
13	Ganda BLUD RSUD	3.819.041,00	BLUD RSUD
14	Ganda BLUD RSUD	15.613.789,00	BLUD RSUD
	Terdapat SP2D cair		
15	ganda:92.00/04.0/000099/LS/2.08.2.14.0.00.01.0000/PR/12/2024/DPMK/GAJI P3K BLN DESEMBER 2024	9.531.622,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Total		521.873.731,00	

Dengan sampai per 31 Desember 2024 kesalahan tersebut di atas belum dikoreksi mutasi di Rekening Kas Umum Daerah.

5.2 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp133.941.986.165,94. Ringkasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH	
	2024	2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	378.298.407.347,42	1.338.819.354.372,04
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	367.655.057.876,83	1.333.489.021.658,33
Sub Total	10.643.349.470,59	5.330.332.713,71
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	133.941.986.165,94	378.298.407.347,42
Sub Total	144.585.335.636,53	383.628.740.061,13
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(12.168.616.475,63)	(4.168.277.664,00)
Lain-lain	1.525.267.005,04	(1.162.055.049,71)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	133.941.986.165,94	378.298.407.347,42

5.3 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS NERACA DAERAH

5.3.1 ASET

Aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Papua Barat meliputi kelompok aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya dengan penjelasan per jenis aset di masing masing kelompok aset diuraikan berikut ini:

1) ASET LANCAR

Aset lancar adalah aset yang dapat digunakan atau dapat dipakai habis dalam waktu 12 bulan mendatang.

Aset lancar yang dimiliki meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Pendapatan, Piutang Lainnya setelah diperhitungkan dengan Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Di muka dan Persediaan.

a. Kas di Kas Daerah

Rp124.193.082.616,94

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada pada Kas Daerah per 31 Desember 2024. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp124.193.082.616,94 atau 38,15% apabila dibandingkan dengan Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp325.538.508.246,79 yang disimpan pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Bank	Nomor Rekening	Saldo
1	RKUD PROV. PAPUA BARAT	3000102000003	48.159.456.091,30
2	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	3000102010295	-
3	PAD PROVINSI PAPUA BARAT	3000102010209	416.100,00
4	REK KASDA DTI PROV. PAPUA BARAT	3000102000011	9.662.795.847,00
5	REK KASDA TAMBAHAN DBH MIGAS OTSUS PROV.PB	3000102000077	4.303.069.708,00
6	REK KASDA DANA OTSUS 1% PROV. PAPUA BARAT	3000102000088	27.330.130.001,00
7	REK KASDA DANA OTSUS 1,25% PROV. PAPUA BARAT	3000102000099	13.064.765.807,00
8	PENAMPUNGAN DEPOSITO PEMPROV. PAPUA BARAT	0084285953	7.869.666.412,00
9	REKENING PENAMPUNGAN PENEMPATAN DEPOSITO	035301000374309	13.802.782.650,64
10	DEPOSITO		-
Jumlah			124.193.082.616,94

Saldo masing-masing rekening Bank adalah berdasarkan hasil Rekonsiliasi Saldo Kas Daerah pada **Lampiran I**.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp1.609.665.577,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa UP yang belum disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.487.442.671,80,00 koreksi lainnya Rp122.183.000,20, dan jasa giro rekening bendahara pengeluaran SKPD yang belum didebet ke kas daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp39.905,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	0,00
2	Dinas Kesehatan	1.155.276,00
3	RSUD	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	290.000.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.000,00
7	Dinas Sosial	0,00
8	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	0,00
12	Dinas Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	14.175.500,00
14	Dinas Perhubungan	217.355.102,00
15	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	0,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	2.000.000,00
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	250.000,00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100.000.000,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.538.371,00
22	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dan Perkebunan	764.800,00
23	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	180.000,00
24	Dinas Kehutanan	58.159,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00
27	Sekretariat Daerah	0,00
28	Biro Umum	0,00
29	Biro Administrasi Pimpinan	0,00
30	Biro Organisasi	0,00
31	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00
32	Biro Kesejahteraan Rakyat	122.183.000,20
33	Biro Hukum	0,00
34	Biro Perekonomian	0,00
35	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	94.980.000,00
36	Biro Administrasi Pembangunan	100.000.000,80
37	Biro Administrasi Pelaksanaan Otsus Khusus	0,00
38	Inspektorat	9.000,00
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	136.345.106,00
40	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	800.000,00
41	Badan Pendapatan Daerah	0,00
42	Badan Kepegawaian Daerah	179.110,00
43	Badan Pengembangan SDM Daerah	0,00
44	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00
45	Sekretariat DPRD Papua Barat	0,00
46	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat	0,00
47	Badan Penghubung Daerah	39.905,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	523.563.247,00
Jumlah		1.609.665.577,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.609.665.577,00 atau 7,35% apabila dibandingkan dengan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.909.213.151,00.

Sedangkan penyelesaian sisa kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024 yang disetor Tahun 2025 disajikan pada **Lampiran IIA** laporan keuangan ini.

c. Kas di BLUD **Rp 5.713.633.822,00**

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan saldo kas sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp5.713.633.822,00 terdiri dari:

No	Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat	1.472.579.809,00
2	Kawasan Konservasi Perairan Kaimana-Fakfak	1.358.800.359,00
3	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.882.253.654,00
Jumlah		5.713.633.822,00

Saldo Kas di Bendahara BLUD berdasarkan hasil rekonsiliasi dapat dilihat pada **Lampiran IIB**.

d. Kas di Bendahara BOS **Rp1.479.178,00**

Kas di Bendahara BOS merupakan uang yang berada dalam pengelolaan Dinas Pendidikan yang tidak melalui RKUD. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.479.178,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

Pasca urusan SMA/SMK dihapus, maka Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat kini berwenang menjalankan pengelolaan SMA/SMK khusus dan Sekolah Luar Biasa (SLB) antara lain: 1). SMA Taruna Kasuari Nusantara sesuai Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Bagi Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri Taruna Kausari Nusantara Provinsi Papua Barat yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2024; 2). Sekolah Keberbakatan Olahraga Papua Barat sesuai Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Bagi Pendidikan Sekolah Menengah Keberbakatan Olahraga Provinsi Papua Barat yang ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2024; 3). SLB Panca Kasih Manokwari sesuai Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 228 Tahun 2024 tentang Perubahan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Swasta Panca Kasih Menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri.

Saldo Kas di Bendahara BOS berdasarkan hasil Rekapitulasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dilihat pada **Lampiran III**.

e. Kas Lainnya **Rp1.902.251.241,00**

Kas Lainnya merupakan uang yang berada dalam pengelolaan Bank Papua. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.902.251.241,00 atau 0,00% bila dibandingkan dengan per 31 Desember 2023. Saldo Kas Lainnya sebesar Rp1.902.251.241,00 merupakan uang yang harus dibayarkan ke BULOG tetapi per 31 Desember 2024 masih berada dalam rekening bank..

f. Piutang Pajak **Rp1.701.385.100,00**

Piutang Pajak Daerah adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah. Saldo Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.701.385.100,00 merupakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1.500.565.400,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp200.819.700,00 dan Piutang Pendapatan Air Permukaan sebesar Rp0,00. Nilai piutang tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp3.495.406.000,00 atau 48,67% bila dibandingkan dengan per 31 Desember 2024. Rincian Piutang Pajak beserta penyisihannya dapat dilihat pada **Lampiran IVA**.

g. Piutang Retribusi **Rp145.396.000,00**

Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp145.396.000,00 merupakan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas sewa gedung oleh Bank BRI yang belum dilakukan pembayaran per 31 Desember 2024.

h. Piutang Lain-lain PAD **Rp292.348.100,00**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.338.267.111,00 terdiri dari:

No	Piutang Lain-lain PAD	Jumlah (Rp)
1	Piutang Denda Pajak Kendaraan Bermotor	255.092.700,00
2	Piutang Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	37.255.400,00
Jumlah		292.348.100,00

Nilai piutang tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan saldo Piutang Lain-lain PAD per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp4.018.622.400,00 atau 92,73% bila dibandingkan dengan per 31 Desember 2024. Rincian Piutang Lain-lain PAD dan penyisihannya dapat dilihat pada **Lampiran IVA**.

i. Piutang Lainnya **Rp 20.095.633.308,52**

Saldo piutang lain-lain Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp20.095.633.308,52 atau 143,51% apabila dibandingkan dengan Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2023

sebesar Rp14.003.140.081,76. Rincian Piutang Lainnya beserta penyisihannya dapat dilihat pada **Lampiran IVB**.

j. Penyisihan Piutang **Rp(9.886.834.938,62)**

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Saldo penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.886.834.938,62 merupakan penyisihan atas Piutang Pajak sebesar Rp1.632.170.360,00 Piutang Lain-lain PAD sebesar Rp287.247.470,00 dan Piutang Lainnya sebesar Rp7.967.417.108,62.

k. Beban Dibayar Di Muka **Rp113.535.892.717,00**

Beban Dibayar Di Muka adalah pengeluaran kas yang terjadi mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan sehingga belum dapat diakui sebagai Beban/Belanja. Saldo Belanja Dibayar Di Muka sebesar Rp113.535.892.717,00 dihitung berdasarkan bulan pemanfaatan barang atau jasa dari total pembayarannya, yang secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran IVC**.

l. Persediaan **Rp1.944.276.901.207,51**

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat senilai biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Persediaan Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2024 senilai Rp1.944.276.901.207,51 atau 94,55% apabila dibandingkan dengan Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.056.407.660.268,16. Nilai persediaan Rp1.944.276.901.207,51, terdiri dari persediaan barang-barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga baik masyarakat, pemerintah kabupaten/kota dan instansi pemerintah pusat lainnya yang sampai 31 Desember 2024 belum diserahkan sebesar Rp1.936.777.718.166,66. Persediaan tersebut telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga namun masih dicatat sebagai persediaan karena belum ada penyerahan dalam bentuk berita acara serah terima oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan pihak terkait. Dan persediaan barang pakai habis yang tidak habis digunakan sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp7.499.183.040,85.

Rincian perhitungan persediaan per SKPD dapat dilihat dalam **Lampiran IVD**.

2) INVESTASI JANGKA PANJANG

a. Investasi Permanen **Rp454.189.951.219,50**

Investasi Permanen yang dimiliki oleh Pemerintah Povinsi Papua Barat adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah atas PT. Bank Papua dan PT. Papua Doberai Mandiri. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Saldo Investasi Permanen Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp454.189.951.219,50, dengan rincian sebagai berikut :

PT. Bank Papua	Rp	430.640.000.000,00
PT. Papua Doberai Mandiri	Rp	23.549.951.219,50
Jumlah	Rp	454.189.951.219,50

Investasi Permanen yang dimiliki oleh Pemerintah Povinsi Papua Barat atas PT. Bank Papua sebesar Rp430.640.000.000,00 senilai 86,128 lembar saham atau 15,69% dari total modal disetor Rp2.744.678.138.942,00. Investasi permanen berupa penyertaan modal kepada PT. Bank Papua diakui dan diukur dengan metode *Cost Method*, sedangkan penyertaan modal kepada PT. Papua Doberai Mandiri diakui dan diukur dengan *Equity Method*. Kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT Papua Doberai Mandiri adalah 100% dari nilai penyertaan sebesar Rp50.000.000.000,00 yang berasal dari APBD tahun anggaran 2010. Tahun 2016 penyertaan modal ke PT. Papua Doberai Mandiri bertambah sebesar Rp10.000.000.000,00 sehingga penyertaan modal menjadi sebesar Rp60.000.000.000,00.

**PERHITUNGAN INVESTASI PERMANEN
PENYERTAAN MODAL PADA PT. PAPUA DOBERAI MANDIRI
TAHUN 2010 s.d TAHUN 2024**

TAHUN	PENYERTAAN MODAL	KERUGIAN	PENGAKUAN PENGURANGAN INVESTASI (99% x KERUGIAN)	JUMLAH SISA MODAL INVESTASI YANG DISERTAKAN
2010	49.750.000.000,00	1.068.367.744,00	1.057.684.066,56	48.692.315.933,44
2011	0,00	2.315.113.525,00	2.291.962.389,75	46.400.353.543,69
2012	0,00	2.029.292.865,00	2.008.999.936,35	44.391.353.607,34
2013	0,00	7.151.668.283,00	7.080.151.600,17	37.311.202.007,17
TOTAL AUDITED 2013	49.750.000.000,00	12.564.442.417,00	12.438.797.992,83	37.311.202.007,17
Koreksi Kerugian Tahun 2013		(742.730.078,00)	(735.302.777,22)	38.046.504.784,39
2014	0,00	4.132.479.987,00	4.091.155.187,13	33.955.349.597,26
Total Mutasi 2014	0,00	3.389.749.909,00	3.355.852.409,91	
TOTAL LKPD 2014	49.750.000.000,00	15.954.192.326,00	15.794.650.402,74	33.955.349.597,26
2015	0,00	(105.566.327,00)	(104.510.663,73)	34.059.860.260,99
TOTAL LKPD 2015	49.750.000.000,00	15.848.625.999,00	15.690.139.739,01	34.059.860.260,99
Koreksi Kerugian Tahun 2010	0,00	(198.199.893,00)	(196.217.894,07)	34.256.078.155,06
Koreksi Kerugian Tahun 2011	0,00	0,00	0,00	34.256.078.155,06
Koreksi Kerugian Tahun 2012	0,00	0,00	0,00	34.256.078.155,06
Koreksi Kerugian Tahun 2013	0,00	(608.651.515,00)	(602.564.999,85)	34.858.643.154,91
Koreksi Kerugian Tahun 2014	0,00	1.528.836.957,00	1.513.548.587,43	33.345.094.567,48
Koreksi Kerugian Tahun 2015	0,00	1.017.662.064,00	1.007.485.443,36	32.337.609.124,12
2016	10.000.000.000,00	(1.173.818.495,00)	(1.168.927.584,60)	43.506.536.708,72
Total Mutasi 2016	10.000.000.000,00	565.829.118,00	553.323.552,27	
TOTAL LKPD 2016	59.750.000.000,00	16.414.455.117,00	16.243.463.291,28	43.506.536.708,72
Koreksi Kerugian Tahun 2016	0,00	6.266.834.172,00	6.240.722.362,95	37.265.814.345,77
SETELAH KOREKSI LKPD 2016	59.750.000.000,00	22.681.289.289,00	22.484.185.654,23	37.265.814.345,77
2017	0,00	(1.204.919.906,00)	(1.199.899.406,39)	38.465.713.752,17
TOTAL LKPD 2017	59.750.000.000,00	21.476.369.383,00	21.284.286.247,83	38.465.713.752,17
Koreksi Laba 2017	0,00	560.754.800,00	558.418.321,67	37.907.295.430,50
SETELAH KOREKSI LKPD 2017	59.750.000.000,00	22.037.124.183,00	21.842.704.569,50	37.907.295.430,50
2018	0,00	(684.351.448,11)	(681.499.983,73)	38.588.795.414,23
TOTAL LKPD 2018	59.750.000.000,00	21.352.772.734,89	21.161.204.585,77	38.588.795.414,23
Koreksi Rugi 2018	0,00	56.194.506,46	55.960.362,68	38.532.835.051,55
SETELAH KOREKSI LKPD 2018	59.750.000.000,00	21.408.967.241,35	21.217.164.948,45	38.532.835.051,55
Laba 2019	0,00	(1.740.352.289,67)	(1.733.100.821,80)	40.265.935.873,35
TOTAL LKPD 2019	59.750.000.000,00	19.668.614.951,68	19.484.064.126,65	40.265.935.873,35
Koreksi Rugi 2019	0,00	2.205.868.270,32	2.196.677.152,53	38.069.258.720,82
SETELAH KOREKSI LKPD 2019	59.750.000.000,00	21.874.483.222,00	21.680.741.279,18	38.069.258.720,82
Laba 2020	0,00	(244.372.314,71)	(243.354.096,73)	38.312.612.817,55
TOTAL LKPD 2020	59.750.000.000,00	21.630.110.907,29	21.437.387.182,45	38.312.612.817,55
Koreksi Rugi 2020	0,00	1.324.234.867,71	1.318.717.222,43	36.993.895.595,12
SETELAH KOREKSI LKPD 2020	59.750.000.000,00	22.954.345.775,00	22.756.104.404,88	36.993.895.595,12
Laba 2021	0,00	137.526.155,21	136.953.129,56	36.856.942.465,56
TOTAL LKPD 2021	59.750.000.000,00	23.091.871.930,21	22.893.057.534,44	36.856.942.465,56
Koreksi 2021	0,00	1.263.307.469,79	1.258.043.688,67	35.598.898.776,89
Rugi 2022	0,00	4.929.702.143,85	4.909.161.718,25	30.689.737.058,64
Koreksi 2018-2022 100%	0,00	0,00	30.198.988,99	30.659.538.069,65
TOTAL LKPD 2022	59.750.000.000,00	29.284.881.543,85	29.090.461.930,35	30.659.538.069,65
Pengembalian Saham (dari penyertaan modal Rp50.000.000.000,00)	250.000.000,00			30.909.538.069,65
Koreksi Rugi 2022	0,00	623.954.586,15	623.954.586,15	30.285.583.483,50
Rugi 2023	0,00	4.919.242.021,60	4.919.242.021,60	25.366.341.461,90
Deviden	0,00	0,00	100.000.000,00	25.266.341.461,90
Koreksi BPK	0,00	0,00	194.419.593,93	25.071.921.867,97
TOTAL LKPD 2023	60.000.000.000,00	34.828.078.151,60	34.928.078.132,03	25.071.921.867,97
Rugi 2024	0,00	1.521.970.648,47	1.521.970.648,47	23.744.370.813,43
TOTAL LKPD 2024	60.000.000.000,00	36.350.048.800,07	36.450.048.780,50	23.549.951.219,50

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 04 Irianto, S.H., M.Kn. tanggal 22 Desember 2018 yang menyebutkan bahwa kepemilikan saham 1% yang dimiliki oleh Koperasi Pegawai telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi, sehingga total kepemilikan saham Pemerintah Provinsi pada PT. Padoma menjadi sebesar 100%.

Dalam Laporan Perubahan Modal per 31 Desember 2024 (*Unaudited*) PT. Papua Doberai Mandiri membukukan rugi 2024 senilai Rp1.521.970.648,47.

Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilihat pada **Lampiran V**.

3) ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap Provinsi Papua Barat diperoleh dari dana yang bersumber dari APBD atau APBN melalui pembelian, pembangunan, proses kapitalisasi dan hibah dari Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat. Aset Tetap Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2024 senilai Rp20.681.868.661.131,10 (rincian aset tetap dapat dilihat pada **Lampiran VI**) dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2023	21.655.323.346.902,10
Penambahan Tahun 2024	1.084.765.706.954,36
Jumlah	22.740.089.053.856,50
Pengurangan Tahun 2024	2.058.220.392.725,40
Saldo Per 31 Desember 2024	20.681.868.661.131,10

Aset Tetap Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.681.868.661.131,10 tersebut meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dirinci sebagai berikut:

Jenis Aset	31-Dec-23	Penambahan	Pengurangan	31-Dec-24
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Tanah	1.487.718.520.381,00	27.262.502.821,00	122.358.246.698,00	1.392.622.776.504,00
Peralatan dan Mesin	1.819.703.780.419,46	135.567.853.521,33	279.932.278.947,72	1.675.339.354.993,07
Gedung dan Bangunan	4.199.358.270.147,09	182.120.889.043,35	1.101.911.310.127,68	3.279.567.849.062,76
Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.150.279.473.515,10	522.416.166.768,00	471.484.646.645,00	11.201.210.993.638,10
Aset Tetap Lainnya	341.161.950.602,00	1.722.710.000,00	10.418.395.659,00	332.466.264.943,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	2.657.101.351.837,45	215.675.584.800,68	72.115.514.648,00	2.800.661.421.990,13
Jumlah	21.655.323.346.902,10	1.084.765.706.954,36	2.058.220.392.725,40	20.681.868.661.131,10

a. Tanah**Rp1.392.622.776.504,00**

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya meliputi harga pembelian dan biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Saldo Tanah Pemerintah Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2024 senilai Rp1.392.622.776.504,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	1.487.718.520.381,00
Penambahan Tahun 2024	Rp	27.262.502.821,00
Pengurangan Tahun 2024	Rp	122.358.246.698,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	1.392.622.776.504,00

Penambahan Aset Tetap Tanah tahun 2024 sebesar Rp27.262.502.821,00 berasal dari:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal 2024	10.892.907.624,00
2	Penambahan Aset Tetap dari Non-Belanja Modal 2024	132.955.000,00
3	Penambahan Aset Tetap dari Hutang Belanja Modal 2024	14.777.870.197,00
4	Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Tetap yg lain	1.458.770.000,00
	TOTAL	27.262.502.821,00

1. Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal 2024 Rp10.892.907.624,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Kehutanan	388.000.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	10.504.907.624,00
	TOTAL	10.892.907.624,00

2. Penambahan Aset Tetap dari Non-Belanja Modal 2024 Rp132.955.000,00 pada Dinas Kesehatan.
3. Penambahan Aset Tetap dari Hutang Belanja Modal 2024 Rp14.777.870.197,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.
4. Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Tetap yg lain Rp1.458.770.000,00 pada Dinas Kesehatan.

Pengurangan Aset Tetap Tanah tahun 2024 sebesar Rp122.358.246.698,00 berasal dari:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pengurangan Aset Tetap karena Dihilangkan	111.853.339.074,00
2	Pengurangan Aset Tetap karena Bukan Aset Tetap (Barang/Jasa/Persediaan)	891.639.020,00
3	Pengurangan Aset Tetap karena Pembayaran Hutang	9.613.268.604,00
	TOTAL	122.358.246.698,00

1. Pengurangan Aset Tetap karena Dihilangkan Rp111.853.339.074,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan	90.840.123.220,00	Penyerahan Aset tetap dari PB ke PBD
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	6.557.059.169,00	Penyerahan Aset tetap dari PB ke PBD
3	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	500.000.000,00	Penyerahan Aset tetap dari PB ke PBD
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.642.670.685,00	Penyerahan Aset tetap dari PB ke PBD
5	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	150.000.000,00	Penyerahan Aset tetap dari PB ke PBD
6	Dinas Kehutanan	2.500.000.000,00	Penyerahan Aset tetap dari PB ke PBD
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.663.486.000,00	Penyerahan Aset tetap dari PB ke PBD
	TOTAL	111.853.339.074,00	

2. Pengurangan Aset Tetap karena Bukan Aset Tetap (Barang/Jasa/Persediaan) senilai Rp891.639.020,00 pada Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan karena Biaya jasa pengukuran, pemetaan kadastral dan lain-lain.

3. Pengurangan Aset Tetap karena Pembayaran Hutang Rp9.613.268.604,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

b. Peralatan dan Mesin

Rp1.675.339.354.993,07

Peralatan dan mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya meliputi harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya yang tercantum di dalam kontrak/SPK untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Saldo peralatan dan mesin Pemerintah Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.675.339.354.993,07 yang tercatat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	1.819.703.780.419,46
Penambahan Tahun 2024	Rp	135.567.853.521,33
Pengurangan Tahun 2024	Rp	279.932.278.947,72
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	1.675.339.354.993,07

Penambahan nilai peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp135.567.853.521,33 berasal dari:.

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal 2024	60.367.108.642,33
2	Penambahan Aset Tetap dari Non-Belanja Modal 2024	147.301.937,00
3	Penambahan Aset Tetap dari Hibah Pihak Lain	1.383.083.000,00
4	Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Tetap yg lain	28.957.081.442,00
5	Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi dari SKPD Lain	44.713.278.500,00
	TOTAL	135.567.853.521,33

1. Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal 2024 Rp60.367.108.642,33 dengan rincian sebagai berikut :

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan	4.145.331.192,00
2	Dinas Kesehatan	2.326.618.000,00
3	UPT Rumah Sakit Provinsi Papua Barat	23.228.960.670,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Provinsi Papua Barat	2.571.011.020,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.096.044.000,00

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	129.687.055,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi	1.410.900.000,00
7	Dinas Sosial	58.089.865,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	406.658.115,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	128.216.415,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	232.371.500,00
11	Dinas Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	50.200.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	125.645.238,00
13	Dinas Perhubungan	600.023.000,00
14	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	2.903.846.700,00
15	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah	145.824.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	54.466.890,00
17	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	353.010.000,00
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	551.550.000,00
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	311.228.332,00
20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.082.259.662,00
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	780.774.000,00
22	Dinas Kehutanan	6.012.156.286,33
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	63.636.000,00
24	Sekretariat Daerah	500.800.000,00
25	Biro Pemerintahan	75.083.000,00
26	Biro Kesejahteraan Rakyat	150.349.000,00
27	Biro Perekonomian	99.927.932,00
28	Biro Umum	3.070.975.200,00
29	Biro Administrasi Pimpinan	33.208.417,00

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
30	Biro Administrasi Pembangunan	183.337.329,00
31	Badan Penghubung Daerah	223.509.290,00
32	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat	613.764.345,00
33	Inspektorat Daerah Provinsi	329.773.998,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	433.700.610,00
35	Badan Pendapatan Daerah	2.295.319.600,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	3.164.262.565,00
37	Badan Kepegawaian Daerah	118.900.000,00
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	185.043.250,00
39	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	120.646.166,00
	TOTAL	60.367.108.642,33

2. Penambahan Aset Tetap dari Non-Belanja Modal 2024 Rp147.301.937,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	22.910.000,00
2	Biro Pemerintahan	4.391.937,00
3	Biro Umum	120.000.000,00
	TOTAL	147.301.937,00

3. Penambahan Aset Tetap dari Hibah Pihak Lain Rp1.383.083.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan	303.013.000,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.080.070.000,00
	TOTAL	1.383.083.000,00

4. Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Tetap yg lain Rp28.957.081.442,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan	750.670.000,00
2	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	551.620.000,00
3	Dinas Perhubungan	26.981.579.492,00

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	199.578.000,00
5	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	473.633.950,00
	TOTAL	28.957.081.442,00

5. Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi dari SKPD Lain Rp44.713.278.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	20.300.000,00	MUTASI DARI BIRO OTSUS
2	Dinas Perhubungan	3.617.714.500,00	MUTASI DARI BIRO UMUM
3	Dinas Perhubungan	19.692.000.600,00	MUTASI DARI BIRO UMUM
4	Dinas Perhubungan	15.676.603.400,00	MUTASI DARI BIRO UMUM
5	Dinas Perhubungan	5.706.660.000,00	MUTASI DARI BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	TOTAL	44.713.278.500,00	

- Pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp279.932.278.947,72 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pengurangan Aset Tetap karena Penghapusan	16.353.257.200,00
2	Pengurangan Aset Tetap karena Dihilangkan	215.908.804.410,00
3	Pengurangan Aset Tetap karena Bukan Aset Tetap (Barang/Jasa/Persediaan)	1.039.890.481,74
4	Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi ke Aset Tetap yg lain	613.000.000,00
5	Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi ke SKPD lain	44.713.278.500,00
6	Pengurangan Aset Tetap karena Ekstrakomtable	1.208.048.355,98

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
7	Pengurangan Aset Tetap karena Kurang Volume	96.000.000,00
	TOTAL	279.932.278.947,72

1. Pengurangan Aset Tetap karena Penghapusan Rp16.353.257.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Dinas Kesehatan	1.197.563.000,00	data berdasarkan SK penghapusan
2	Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Provinsi Papua Barat	457.500.000,00	data berdasarkan SK penghapusan
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	520.000.000,00	data berdasarkan SK penghapusan
4	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	184.300.000,00	data berdasarkan SK penghapusan
5	Dinas Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	189.000.000,00	data berdasarkan SK penghapusan
6	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah	392.800.000,00	data berdasarkan SK penghapusan
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	160.000.000,00	data berdasarkan SK penghapusan
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	197.650.000,00	data berdasarkan SK penghapusan
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.687.850.000,00	data berdasarkan SK penghapusan
10	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	200.000.000,00	data berdasarkan SK penghapusan

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
11	Biro Hukum	503.000.000,00	data berdasarkan SK penghapusan
12	Biro Kesejahteraan Rakyat	946.540.000,00	data berdasarkan SK penghapusan
13	Biro Organisasi	206.500.000,00	data berdasarkan SK penghapusan
14	Biro Umum	3.486.784.200,00	data berdasarkan SK penghapusan
15	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3.634.330.000,00	data berdasarkan SK penghapusan
16	Badan Penghubung Daerah	1.019.440.000,00	data berdasarkan SK penghapusan
17	Inspektorat Daerah Provinsi	206.500.000,00	data berdasarkan SK penghapusan
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	220.000.000,00	data berdasarkan SK penghapusan
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	725.000.000,00	data berdasarkan SK penghapusan
20	Badan Kepegawaian Daerah	218.500.000,00	data berdasarkan SK penghapusan
	TOTAL	16.353.257.200,00	

2. Pengurangan Aset Tetap karena Dihilangkan Rp215.908.804.410,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan	192.837.130.309,39	Penyerahan aset dari PB ke PBD dan Kabupaten se-Manokwari Raya
2	Dinas Kesehatan	1.384.448.000,00	Penyerahan Aset tetap dari PB ke PBD

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
3	Dinas Sosial	499.905.000,00	Penyerahan Aset tetap dari PB ke PBD
4	Dinas Perhubungan	1.499.408.260,00	Penyerahan Aset tetap dari PB ke PBD
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.045.833.379,61	Penyerahan Aset tetap dari PB ke PBD
6	Dinas Kelautan dan Perikanan (Blud Raja Ampat)	962.066.000,00	Penyerahan Aset tetap dari PB ke PBD
7	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	78.943.750,00	Penyerahan Aset tetap dari PB ke PBD
8	Dinas Kehutanan	5.853.278.405,00	Penyerahan Aset tetap dari PB ke PBD
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	699.541.466,00	Penyerahan Aset tetap dari PB ke PBD
10	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3.048.249.840,00	Penyerahan Aset tetap dari PB ke PBD
	TOTAL	215.908.804.410,00	

3. Pengurangan Aset Tetap karena Bukan Aset Tetap (Barang/Jasa/Persediaan) Rp1.039.890.481,74 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan	341.633.177,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
2	Dinas Kesehatan	221.548.000,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
3	UPT Rumah Sakit Provinsi Papua Barat	159.776.568,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	104.320.000,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.133.330,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
6	Dinas Ketahanan Pangan	6.105.000,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
7	Dinas Perhubungan	7.206.000,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.040.000,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
9	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	36.690.005,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
10	Biro Umum	10.023.433,74	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
11	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat	62.452.718,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	35.800.000,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
13	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	39.162.250,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
	TOTAL	1.039.890.481,74	

4. Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi ke Aset Tetap yg lain Rp499.500.000,00 pada Dinas Pendidikan.
5. Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi ke SKPD lain Rp44.713.278.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	20.300.000,00	MUTASI DARI BIRO OTSUS KE DINAS TRANSMIGRASI
2	Dinas Perhubungan	44.692.978.500,00	MUTASI DARI BIRO UMUM DAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA KE DINAS TRANSMIGRASI
	TOTAL	44.713.278.500,00	

6. Pengurangan Aset Tetap karena Ekstrakomptable Rp1.208.048.355,98 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan	146.399.540,00
2	Dinas Kesehatan	93.367.600,00
3	UPT Rumah Sakit Provinsi Papua Barat	94.506.995,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	690.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.688.832,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.249.332,00
7	Dinas Ketahanan Pangan	77.713.332,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	4.754.352,00
9	Dinas Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.590.980,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	665.889,00
11	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	4.749.500,00
12	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	5.320.000,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	68.517.010,00
14	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	4.810.000,00
15	Dinas Kehutanan	77.530.676,58
16	Sekretariat Daerah	19.853.000,00
17	Biro Pererkenomian	2.880.111,00

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
18	Biro Umum	13.799.201,40
19	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00
20	Biro Administrasi Pimpinan	2.106.339,00
21	Biro Administrasi Pembangunan	25.874.666,00
22	Badan Penghubung Daerah	7.854.290,00
23	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat	210.561.665,00
24	Inspektorat Daerah Provinsi	4.298.000,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	29.581.265,00
26	Badan Pendapatan Daerah	108.734.850,00
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	148.506.930,00
28	Badan Kepegawaian Daerah	18.900.000,00
29	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.944.000,00
	TOTAL	1.208.048.355,98

7. Pengurangan Aset Tetap karena Kurang Volume Rp96.000.000,00 pada Dinas Perhubungan .

c. Gedung dan Bangunan Rp3.279.567.849.062,76

Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya meliputi harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris, pajak, perencanaan, dan pengawasan sampai siap pakai. Saldo gedung dan bangunan Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2024 senilai Rp3.279.567.849.062,76 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	4.199.358.270.147,09
Penambahan Tahun 2024	Rp	182.120.889.043,35
Pengurangan Tahun 2024	Rp	1.101.911.310.127,68
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	3.279.567.849.062,76

Penambahan nilai Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp182.120.889.043,35 berasal dari:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal 2024	135.074.382.076,35

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
2	Penambahan Aset Tetap dari Non-Belanja Modal 2024	11.992.755.330,00
3	Penambahan Aset Tetap dari Hutang Belanja Modal 2024	2.787.201.675,00
4	Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Tetap yg lain	31.013.519.962,00
5	Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi dari SKPD Lain	1.253.030.000,00
	TOTAL	182.120.889.043,35

1. Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal 2024 Rp135.074.382.076,35 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan	33.913.354.106,00
2	Dinas Kesehatan	5.514.890.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Provinsi Papua Barat	11.247.903.706,00
4	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	551.620.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	1.993.306.000,00
6	Dinas Perhubungan	38.977.824.808,00
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	720.139.421,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.707.041.000,00
9	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	6.459.936.050,00
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	170.550.119,00
11	Dinas Kehutanan	25.152.142.384,35
12	Biro Umum	201.649.000,00
13	Badan Pendapatan Daerah	4.039.059.482,00
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	2.424.966.000,00
	TOTAL	135.074.382.076,35

2. Penambahan Aset Tetap dari Non-Belanja Modal 2024 Rp11.992.755.330 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Kesehatan	1.662.935.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	116.500.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan	

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
	Transmigrasi	729.542.000,00
4	Disdukcapil	502.650.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	499.961.453,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	818.332.350,00
7	Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan	242.500.000,00
8	Biro Umum	2.212.464.000,00
9	Inspektorat Provinsi	285.300.000,00
10	Badan Pendapatan Daerah	1.807.796.027,00
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.534.086.500,00
12	BPSDM	1.580.688.000,00
	TOTAL	11.992.755.330,00

3. Penambahan Aset Tetap dari Hutang Belanja Modal 2024 Rp2.787.201.675,00 pada Dinas Perhubungan.

4. Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Tetap yg lain Rp31.013.519.962 dengan rincian sebagai berikut :

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan	499.500.000,00
2	Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat	29.915.460.962,00
3	Badan Pendapatan Daerah	598.559.000,00
	TOTAL	31.013.519.962,00

5. Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi dari SKPD Lain Rp1.253.030.000 pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik yang mendapatkan mutasi dari Biro Administrasi Pimpinan.

Pengurangan nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp1.101.911.310.127,68 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pengurangan Aset Tetap karena Dihibahkan	1.036.755.630.817,10
2	Pengurangan Aset Tetap karena Bukan Aset Tetap (Barang/Jasa/Persediaan)	4.449.090.959,00
3	Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi ke Aset Tetap yg lain	59.185.870.751,58
4	Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi ke SKPD lain	1.253.030.000,00

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
5	Pengurangan Aset Tetap karena Kurang Volume	267.687.600,00
	TOTAL	1.101.911.310.127,68

1. Pengurangan Aset Tetap karena Dihibahkan Rp1.036.755.630.817,10 dengan rincian sebagai berikut :

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan	954.362.450.386,00	Penyerahan aset dari PB ke PBD dan Kabupaten se-Manokwari Raya
2	Dinas Kesehatan	2.388.858.000,00	Penyerahan aset dari PB ke PBD
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.752.140.000,00	Data berupa BAST Hibah
4	Dinas Perhubungan	16.715.853.336,10	Penyerahan aset dari PB ke PBD
5	Dinas Koperasi dan Umkm	3.088.918.000,00	Penyerahan aset dari PB ke PBD
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	30.323.407.785,00	Penyerahan aset dari PB ke PBD
7	Dinas Kelautan dan Perikanan (Blud Raja Ampat)	153.000.000,00	Penyerahan aset dari PB ke PBD
8	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.852.599.500,00	Penyerahan aset dari PB ke PBD
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	162.850.000,00	Penyerahan aset dari PB ke PBD
10	Dinas Kehutanan	17.785.331.310,00	Penyerahan aset dari PB ke PBD
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.170.222.500,00	Penyerahan aset dari PB ke PBD
	TOTAL	1.036.755.630.817,10	

2. Pengurangan Aset Tetap karena Bukan Aset Tetap (Barang/Jasa/Persediaan) Rp4.449.090.959 dengan rincian sebagai berikut :

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Dinas Perhubungan	4.203.760.959,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
2	Dinas Kebudayaan	91.169.000,00	BARJAS karena

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
	dan Pariwisata		di bawah nilai Kapitalisasi
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	154.161.000,00	BARJAS karena di bawah nilai Kapitalisasi
	TOTAL	4.449.090.959,00	

3. Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi ke Aset Tetap yg lain Rp59.185.870.751,58 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan	750.670.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Provinsi Papua Barat	6.469.830.000,00
3	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	551.620.000,00
4	Dinas Perhubungan	34.774.063.849,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.303.380.000,00
6	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	1.518.626.050,00
7	Dinas Kehutanan	11.817.680.852,58
	TOTAL	59.185.870.751,58

4. Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi ke SKPD lain Rp1.253.030.000,00 pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik yang mendapatkan mutasi dari Biro Administrasi Pimpinan.
5. Pengurangan Aset Tetap karena Kurang Volume Rp267.687.600,00 pada Dinas Perhubungan.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Rp11.201.210.993.638,10

Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya meliputi biaya perolehan yang terdiri dari biaya konstruksi, perencanaan, dan pengawasan sampai siap pakai. Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.201.210.993.638,10 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	11.150.279.473.515,10
Penambahan Tahun 2024	Rp	522.416.166.768,00
Pengurangan Tahun 2024	Rp	471.484.646.645,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	11.201.210.993.638,10

Penambahan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2024 sebesar Rp522.416.166.768,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal 2024	516.058.585.068,00
2	Penambahan Aset Tetap dari Non-Belanja Modal 2024	726.942.600,00
3	Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Tetap yg lain	5.630.639.100,00
	TOTAL	522.416.166.768,00

1. Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal 2024 Rp516.058.585,68 dengan rincian sebagai berikut :

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan	199.880.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.458.770.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Papua Barat	506.074.075.072,00
4	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	250.000.000,00
5	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	7.477.300.996,00
6	Badan Pendapatan Daerah	598.559.000,00
	TOTAL	516.058.585.068,00

2. Penambahan Aset Tetap dari Non-Belanja Modal 2024 Rp726.942.600 dengan rincian sebagai berikut :

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	696.942.600,00
2	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	30.000.000,00
	TOTAL	726.942.600,00

3. Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Tetap yg lain Rp5.630.639.100,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	UPT Rumah Sakit Provinsi Papua Barat	113.500.000,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.103.802.000,00
3	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	1.044.992.100,00
4	Dinas Kehutanan	1.368.345.000,00
	TOTAL	5.630.639.100,00

Pengurangan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2024 sebesar Rp471.484.646.645,00 berasal dari:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pengurangan Aset Tetap karena D hibahkan	300.984.588.323,00
2	Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi ke Aset Tetap yg lain	167.512.959.322,00
3	Pengurangan Aset Tetap karena Kurang Volume	2.987.099.000,00
	TOTAL	471.484.646.645,00

1. Pengurangan Aset Tetap karena D hibahkan Rp300.984.588.323,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan	6.605.852.975,00	Penyerahan aset dari PB ke PBD dan Kabupaten se-Manokwari Raya
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Papua Barat	123.345.282.000,00	Data berupa BAST Hibah
3	Dinas Perhubungan	76.612.285.352,00	Penyerahan aset dari PB ke PBD
4	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	7.477.300.996,00	Penyerahan aset dari PB ke PBD
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	82.780.777.800,00	Penyerahan aset dari PB ke PBD
6	Dinas Kehutanan	4.163.089.200,00	Penyerahan aset dari PB ke PBD
	TOTAL	300.984.588.323,00	

2. Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi ke Aset Tetap yg lain Rp167.512.959.322 dengan rincian sebagai berikut :

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Kesehatan	1.458.770.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Papua Barat	165.455.630.322,00
3	Badan Pendapatan Daerah	598.559.000,00
	TOTAL	167.512.959.322,00

3. Pengurangan Aset Tetap karena Kurang Volume Rp2.987.099.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

e. Aset Tetap Lainnya

Rp332.466.264.943,00

Aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalam aset tetap. Aset tetap lainnya milik Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp332.466.264.943,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	341.161.950.602,00
Penambahan Tahun 2024	Rp	1.722.710.000,00
Pengurangan Tahun 204	Rp	10.418.395.659,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	332.466.264.943,00

Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp1.722.710.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Penambahan Aset Tetap dari Non-Belanja Modal 2024	1.598.760.000,00
2	Penambahan Aset Tetap dari Hibah Pihak Lain	123.950.000,00
	TOTAL	1.722.710.000,00

1. Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal 2024 Rp1.598.760.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Papua Barat.
2. Penambahan Aset Tetap dari Hibah Pihak Lain Rp. 123.950.000,00 pada Dinas Pendidikan.

Pengurangan aset tetap lainnya tahun 2024 sebesar Rp 10.418.395.659,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pengurangan Aset Tetap karena Dihilangkan	8.355.686.159,00
2	Pengurangan Aset Tetap karena Ekstrakomtable	2.062.709.500,00
	TOTAL	10.418.395.659,00

1. Pengurangan Aset Tetap karena Dihilangkan Rp8.355.686.159 dengan rincian sebagai berikut :

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan	6.093.051.159,00	Pengurangan P3D Prov. PB ke Prov. PBD dan Sekolah Negeri Manokwari Raya
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.262.635.000,00	Pengurangan P3D Prov. PB ke Prov. PBD
	TOTAL	8.355.686.159,00	

2. Pengurangan Aset Tetap karena Ekstrakomtable Rp2.062.709.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Perhubungan	1.280.000,00
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	194.950.000,00
3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	169.775.000,00
4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	476.377.500,00
5	Dinas Kehutanan	19.500.000,00
6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	50.138.500,00
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	112.500.000,00
8	Sekretariat DPRD	565.453.500,00
9	Badan Penghubung Daerah	24.800.000,00
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	447.935.000,00
	TOTAL	2.062.709.500,00

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp2.800.661.421.990,13

Konstruksi dalam pengerjaan menggambarkan biaya yang diakumulasi sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 Rp2.800.661.421.990,13 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	2.657.101.351.837,45
Penambahan Tahun 2024	Rp	215.675.584.800,68
Pengurangan Tahun 2024	Rp	72.115.514.648,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	2.800.661.421.990,13

Penambahan nilai KDP Tahun 2024 sebesar Rp215.675.584.800,68 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Penambahan Aset Tetap dari Non-Belanja Modal 2024	1.294.928.745,00
2	Penambahan Aset Tetap dari Hutang Belanja Modal 2024	5.039.649.944,10
3	Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Tetap yg lain	198.669.592.411,58
4	Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi KDP	10.671.413.700,00
	TOTAL	215.675.584.800,68

1. Penambahan Aset Tetap dari Non-Belanja Modal 2024 Rp1.294.928.745 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Papua Barat.

2. Penambahan Aset Tetap dari Hutang Belanja Modal 2024 Rp5.039.649.944,10 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Papua Barat	4.610.388.786,50
2	Dinas Perhubungan	429.261.157,60
	TOTAL	5.039.649.944,10

3. Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Tetap yg lain Rp198.669.592.411,58 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Papua Barat	171.925.460.322,00
2	Dinas Perhubungan	16.294.796.237,00
3	Dinas Kehutanan	10.449.335.852,58
	TOTAL	198.669.592.411,58

4. Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi KDP Rp10.671.413.700,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Provinsi Papua Barat karena Koreksi Saldo Awal Tahun 2023.

Pengurangan nilai KDP Tahun 2024 sebesar Rp72.115.514.648,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pengurangan Aset Tetap karena Dihilangkan	39.412.852.011,00

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
2	Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi ke Aset Tetap yg lain	29.915.460.962,00
3	Pengurangan Aset Tetap karena Pembayaran Hutang	2.787.201.675,00
	TOTAL	72.115.514.648,00

1. Pengurangan Aset Tetap karena Dihilangkan Rp39.412.852.011 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan	4.885.250.000,00	Pengurangan P3D Prov. PB ke Prov. PBD dan Sekolah Negeri Manokwari Raya
2	Dinas Perhubungan	34.527.602.011,00	Pengurangan Hibah/P3D Prov. PB ke Prov. PBD
	TOTAL	39.412.852.011,00	

2. Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi ke Aset Tetap yg lain Rp29.915.460.962 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Papua Barat.
3. Pengurangan Aset Tetap karena Pembayaran Hutang Rp2.787.201.675,00 pada Dinas Perhubungan.

g. Akumulasi Penyusutan

Rp 8.281.421.819.558,14

Akumulasi Penyusutan Pemerintah Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2024 disajikan komparatif dengan Akumulasi Penyusutan Pemerintah Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2023. Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Papua Barat menggunakan metode garis lurus.

Pada Tahun 2024 dilakukan perhitungan ulang penyusutan karena adanya perubahan masa manfaat. Perubahan tersebut karena nilai sisa masa manfaat melebihi batas maksimum masa manfaat pada kebijakan Akuntansi, khususnya pada Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Rincian penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 dapat dilihat di Daftar Rekap Penyusutan Per SKPD pada **Lampiran VI C**.

Sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 dapat dilihat di Daftar Rekap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per SKPD pada **Lampiran VI D**.

4) ASET LAINNYA**Rp511.168.502.776,97**

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Sampai dengan berakhirnya tahun 2024 aset lainnya Provinsi Papua Barat sebesar Rp511.168.502.776,97 Aset Lainnya terdiri dari Aset Tidak Berwujud, Aset Kondisi Rusak Berat/Hibah, Treasury Deposit Fund (TDF) dan Aset Lain-lain (SKTJM) yang dapat dirinci sebagai berikut:

URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
	PER 31 DESEMBER 2023	TAMBAH	KURANG	PER 31 DESEMBER 2024
Aset Tidak Berwujud	32.678.180.559,00	657.812.000,00	565.000.000,00	32.770.992.559,00
Aset Rusak Berat/Hibah	281.908.486.843,00		2.728.494.815,00	279.179.992.028,00
Treasury Deposit Fund (TDF)	227.451.503.000,00	2.922.373.000,00	105.525.520.824,00	124.848.355.176,00
Aset Lain-Lain (SKTJM)	34.510.791.041,18			34.510.791.041,18
Kurang Volume (Koreksi BPK)	39.547.235.626,00	311.136.346,79		39.858.371.972,79
JUMLAH	616.096.197.069,18	3.891.321.346,79	108.819.015.639,00	511.168.502.776,97

1. Penambahan aset tidak berwujud Tahun 2024 sebesar Rp657.812.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	OPD	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan	ASET TIDAK BERWUJUD	257.021.000,00
2	Dinas Kesehatan		305.650.000,00
3	Dinas Perhubungan		95.141.000,00
	TOTAL		657.812.000,00

2. Pengurangan Aset tidak berwujud Tahun 2024 sebesar Rp565.000.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Blud Raja Ampat).
3. Pengurangan aset rusak berat/hibah Tahun 2024 sebesar Rp2.728.494.815,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	OPD	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan	ASET RUSAK BERAT/HIBAH	1.851.093.950,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan		337.520.865,00
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		539.880.000,00
	TOTAL		2.728.494.815,00

4. Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19

Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* bahwa di Tahun Anggaran 2023 terdapat penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dalam bentuk nontunai dengan *Treasury Deposit Facility* (TDF). *Treasury Deposit Facility* (TDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Kebijakan penyaluran DBH melalui Rekening TDF-TKD ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih sehat, efisien dan efektif, dengan menjaga kas simpanan pemerintah daerah dalam jumlah yang aman. Proses bisnis penyaluran DBH melalui rekening TDF-TKD sebagai berikut:

- a. Pembukaan Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara berdasarkan dari Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelolaan Transfer Umum.
- b. Pengisian dana pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda dilakukan dengan memindahkan dana dari RKUN ke Rekening TDF berdasarkan SP2D Nihil.
- c. Pembayaran remunerasi saldo DBH pada Rekening TDF-TKD yang belum dilakukan penarikan dana oleh Pemerintah Daerah (berdasarkan hasil rekonsiliasi antara DJPK dengan Pemda).
- d. Penarikan DBH dari Rekening Lain BI TDF-TKD ke RKUD yang dilakukan oleh Pemda setelah holding period sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Rekening *Treasury Deposit Facility* Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp124.848.355.176,00, yang terdiri dari sisa TDF 2023 sebesar Rp121.925.982.176,00 dan TDF 2024 sebesar 2.922.373.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Dana	TDF 2023 (Rp)	TDF 2024 (Rp)	Jumlah (Rp)
Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	3.133.745.000,00	-	3.133.745.000,00
Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	13.982.000,00	-	13.982.000,00
Dana Bagi Hasil PBB Biaya Pemungutan untuk Provinsi	10.872.483.704,00	-	10.872.483.704,00
Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi 15%	568.903.000,00	-	568.903.000,00
Dana Bagi Hasil SDA Gas Bumi 30%	105.525.520.824,00	-	105.525.520.824,00
Dana Bagi Hasil SDA Minerba - Iuran Tetap	60.667.000,00	655.706.000,00	716.373.000,00
Dana Bagi Hasil SDA Minerba - Royalti	1.750.680.648,00	1.828.467.000,00	3.579.147.648,00
Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan - IIUPH		438.199.000,00	438.199.000,00
Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan - PSDH		1.000,00	1.000,00
Total	121.925.982.176,00	2.922.373.000,00	124.848.355.176,00

5. Daftar Rekap Aset Lainnya per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran VII A** dan Daftar Rincian SKTJM /SPPH dapat dilihat pada **Lampiran VII B**.

6. Pengurangan Aset Lainnya dari Kurang Volume/Temuan BPK 2023 per 31 Desember 2024 sebesar Rp 30.756.729.403,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	OPD	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan	KURANG VOLUME	7.736.760.884,50
2	Dinas Kesehatan		258.264.400,00
3	RSUD Papua Barat		19.432.830,00
4	Dinas Pekerjaan Umum		6.401.189.075,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		12.676.228.301,30
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		65.253.879,25
7	Satuan Polisi Pamong Praja		37.971.326,50
8	Dinas Sosial		1.530.235,25
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		98.431.105,75
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		170.165.900,00
11	Dinas Ketahanan Pangan		32.500.481,00
12	Dukcapil		32.901.814,50
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung		29.770.200,00
14	Dinas Perhubungan		642.970.600,00
15	Dinas Komunikasi, Persandian dan Statistik		23.734.927,00
16	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kecil Menengah		17.312.247,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		17.446.378,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		19.326.080,00

NO	OPD	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		34.028.800,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		(521.000,00)
21	Dinas Kelautan dan Perikanan		841.838.044,75
22	Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan		6.023.377,25
23	Dinas Kehutanan		9.257.100,00
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Minireal		141.205.996,25
25	Sekretariat Daerah		9.067.672.844,75
26	Biro Kesejahteraan Rakyat		400.000.000,00
27	Sekretariat DPRD		161.171.900,00
28	Badan Penghubung		25.507.966,50
29	Sek Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat		28.193.029,50
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		73.301.329,75
31	Badan Pendapatan Daerah		28.801.276,50
32	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD) /TDF		705.733.239,24
33	Badan Kepegawaian Daerah		49.839.026,50
34	Balitbangda		5.128.376,75
	TOTAL		39.858.371.972,79

5.3.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp158.984.633.930,00 atau 64,33% dari Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp247.146.043.527,00. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Kewajiban Jangka Pendek	11.549.172.478,00
2	Kewajiban Jangka Panjang	157.306.283.269,00
Total		168.855.455.747,00

1) KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka pendek mencakup utang yang berasal dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Di Muka, Utang Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka pendek Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2024 terdiri dari :

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Rp1.902.251.241,00

Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan 10% gaji, 2% pensiun, potongan PPh dan PFK lainnya. Bagi pemerintah daerah PFK antara lain terdiri dari potongan/pungutan iuran Taspen, Taperum, Askes, juga termasuk pajak pusat. Rekapitulasi Buku PFK BUD dapat dilihat pada **Lampiran VIII A** dan Rekapitulasi Penerimaan dan Penyetoran PFK SKPD/BUD pada **Lampiran VIII B**. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap rekening penampungan di Bank Papua terdapat saldo utang PFK sebagai berikut:

Rincian saldo pada rekening penampungan PFK

Nama Rekening	Nomor Rekening	Saldo Awal	Mutasi Kredit (Jumlah potongan yang masuk)	Mutasi Debet (Jumlah potongan yang terbayarkan)	Saldo akhir
Askes Pemda Prov. Papua Barat	307002222008818000	1.382.016.660,00	8.139.460.838,00	7.612.314.966,00	1.909.162.532,00
Titipan Jaminan Kecelakaan Kerja	307002222008815360	323.413.068,00	339.598.991,00	298.949.704,00	364.062.355,00
Titipan Jaminan Kematian JKM	307002222008816360	134.997.530,00	1.013.925.379,00	964.022.380,00	184.900.529,00
IWP Pemda Prov. Papua Barat	307002222008814360	980.980.378,00	12.417.964.425,55	12.025.737.037,00	1.373.207.766,55
Total		2.821.407.636,00	21.910.949.633,55	20.901.024.087,00	3.831.333.182,55

b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Rp0,00

Bagian lancar dari utang jangka panjang merupakan hutang pembelian tanah Biro Pemerintahan yang jatuh tempo di Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

c. Pendapatan Diterima Di Muka

Rp490.268.661,00

Pendapatan Diterima Di Muka adalah pendapatan yang diterima oleh satuan kerja/pemerintah dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari satuan kerja/pemerintah, atau pendapatan pajak/bukan pajak yang telah disetor oleh wajib pajak/bayar ke Rekening Kas Umum Daerah yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau penelitian oleh pihak yang berwenang terdapat lebih bayar pajak/bukan pajak. Saldo Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2024 sebesar Rp470.043.661,00

Perhitungan secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran IXA**.

d. Utang Belanja

Rp9.156.652.576,14

Utang Belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang belanja ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*). Utang belanja sebesar Rp9.156.652.576,14 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	SKPD	Nilai
1	Utang Belanja Pegawai	BLUD KKP Fakfak Kaimana	21.393.000,00
2	Utang Belanja Pegawai	Biro Kesejahteraan Sosial	29.250.000,00
3	Utang Belanja Barang	Dinas Pendidikan	1.740.062.000,00
4	Utang Belanja Jasa	Biro Kesejahteraan Sosial	92.933.000,00
5	Utang Belanja Jasa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	280.000,00
6	Utang Belanja Jasa	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	30.000,00
7	Utang Belanja Jasa	Sekretaris Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat	1.500.000,00
8	Utang Belanja Bunga	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	591.000,00
9	Utang Belanja Modal - Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Dinas Kehutanan	0,04
10	Utang Belanja Modal - Aset Tetap Gedung & Bangunan	Dinas Perhubungan	429.261.157,60
11	Utang Belanja Modal - Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5.796.711.786,50
12	Utang Transfer Bantuan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.044.640.632,00
Total			9.156.652.576,14

Rincian Utang Belanja dapat dilihat pada **Lampiran IX B.**

e. Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0,00

Utang jangka pendek lainnya adalah utang kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran IXB.**

2) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Jumlah kewajiban jangka panjang Pemerintah Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2024 adalah Rp157.306.283.269,00 yang terdiri dari utang kepada masyarakat berdasarkan perjanjian jual beli tanah, yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kantor Gubernur Papua Barat Arfai	19.900.000.000,00
2	Kediaman Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda serta Landmark papua barat	9.670.000.000,00
3	Rumah Jabatan Pimpinan DPRPB	600.000,00
4	Kantor BKN Provinsi Papua Barat	4.000.000.000,00
5	Kantor Satuan Brimob Polda PB	66.500.000.000,00
6	Pembangkit Listrik	500.000.000,00
7	Balai Diklat Perhubungan PB	2.698.300.000,00
8	Tanah Jalan Masuk dan Taman Kantor Gubernur	1.072.000.000,00
9	Tanah Relokasi LP Kampung Ambon	13.500.000.000,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
10	Tanah Rumah Dinas Pejabat Polda PB	22.000.000.000,00
11	PT. Papua Doberai Mandiri	2.000.000.000,00
12	SMK Jimero Kota Sorong	1.200.000.000,00
13	Jalan Kantor Gubernur (Sowi 4)	23.156.676,00
14	Kantor DPRD Provinsi Papua Barat	3.077.625.000,00
15	Perpustakaan Daerah Provinsi Papua Barat	11.164.601.593,00
Jumlah		157.306.283.269,00

Rincian perhitungan kewajiban jangka panjang dapat dilihat pada **Lampiran X**, berdasarkan Rekap Kesepakatan Harga Tanah Biro Pemerintahan yang dapat dilihat pada **Lampiran XI**.

5.3.3 EKUITAS

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.400.530.673.751,60 atau 90,31% dari Ekuitas Dana per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.052.548.148.416,80.

5.4 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan - LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5.4.1 PENDAPATAN – LO

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Saldo Pendapatan – LO tahun 2024 sebesar Rp4.611.850.625.284,07 atau mengalami kenaikan 2,80% dari Pendapatan – LO tahun 2023 sebesar Rp4.486.081.174.387,39 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah – LO Rp399.787.996.478,07

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang0,00undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Saldo Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2024 sebesar Rp399.787.996.478,07 atau mengalami penurunan 29,58% dari Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2023 sebesar Rp567.687.650.917,39 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	270.399.765.423,00	441.519.927.606,00	(171.120.162.183,00)	(38,76)
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	2.110.678.125,00	5.412.283.815,00	(3.301.605.690,00)	(61,00)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	37.152.976.644,00	26.632.211.490,40	10.520.765.153,60	39,50
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	90.124.576.286,07	94.123.228.005,99	(3.998.651.719,92)	(4,25)
JUMLAH		399.787.996.478,07	567.687.650.917,39	(167.899.654.439,32)	(29,58)

a. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Saldo Pendapatan Pajak Daerah – LO tahun 2024 sebesar Rp270.399.765.423,00 atau mengalami penurunan 38,76% dari Pendapatan Pajak Daerah – LO tahun 2023 sebesar Rp441.519.927.606,00.

Rincian nilai Pendapatan Pajak Daerah – LO tahun 2024 menurut objek pendapatan sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	83.103.549.299,00	106.439.768.000,00	(23.336.218.701,00)	(21,92)
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	44.269.018.200,00	72.623.203.900,00	(28.354.185.700,00)	(39,04)
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	97.006.428.825,00	199.197.121.923,00	(102.190.693.098,00)	(51,30)
4	Pajak Air Permukaan - LO	2.225.348.996,00	2.624.704.788,00	(399.355.792,00)	(15,22)
5	Pajak Rokok - LO	43.795.420.103,00	60.635.128.995,00	(16.839.708.892,00)	(27,77)
JUMLAH		270.399.765.423,00	441.519.927.606,00	(171.120.162.183,00)	(38,76)

b. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2024 sebesar Rp2.110.678.125,00 atau mengalami penurunan 61,00% dari Pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2023 sebesar Rp5.412.283.815,00. Rincian nilai Pendapatan Restribusi Daerah – LO tahun 2024 menurut objek pendapatan sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Retribusi Jasa Umum	3.054.250,00	3.054.250,00	-	0,00
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	1.457.462.375,00	2.877.371.165,00	(1.419.908.790,00)	(49,35)
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	650.161.500,00	2.531.858.400,00	(1.881.696.900,00)	(74,32)
JUMLAH		2.110.678.125,00	5.412.283.815,00	(3.301.605.690,00)	(61,00)

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan - LO tahun 2024 sebesar Rp37.152.976.644,00 atau mengalami kenaikan 39,50% dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan - LO tahun 2023 sebesar Rp26.632.211.490,40 .

Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan - LO tahun 2024 menurut objek pendapatan sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	37.152.976.644,00	26.632.211.490,40	10.520.765.153,60	39,50
JUMLAH		37.152.976.644,00	26.632.211.490,40	10.520.765.153,60	39,50

d. Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Saldo Lain-lain PAD Yang Sah - LO tahun 2024 sebesar Rp90.124.576.286,07 atau mengalami penurunan 24,25% dari Lain-lain PAD Yang Sah - LO tahun 2023 sebesar Rp94.123.228.005,99. Rincian Lain-lain PAD Yang Sah – LO tahun 2024 menurut objek pendapatan sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Jasa Giro-LO	15.398.496.255,00	15.322.061.743,79	76.434.511,21	0,50
3	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	29.413.636.882,51	11.521.002.303,97	17.892.634.578,54	0,00
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan	14.174.826.009,03	6.810.575.473,32	7.364.250.535,71	108,13
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	3.047.700.200,00	3.618.772.800,00	(571.072.600,00)	(15,78)
6	Pendapatan dari Pengembalian-LO	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan dari BLUD-LO	28.089.766.939,53	56.850.815.684,91	(28.761.048.745,38)	0,00
JUMLAH		90.124.576.286,07	94.123.228.005,99	(3.998.651.719,92)	(4,25)

2) Pendapatan Transfer – LO

Rp4.210.862.864.806,00

Pendapatan Transfer – LO adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Saldo Pendapatan Transfer – LO tahun 2024 sebesar Rp4.210.862.864.806,00 atau mengalami kenaikan 7,51% dari Pendapatan Transfer – LO tahun 2023 sebesar Rp3.916.739.465.470,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	3.366.972.042.806,00	2.904.797.219.470,00	462.174.823.336,00	15,91
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	843.890.822.000,00	1.011.942.246.000,00	(168.051.424.000,00)	(16,61)
	JUMLAH	4.210.862.864.806,00	3.916.739.465.470,00	294.123.399.336,00	7,51

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2024 menurut objek pendapatan sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Dana Perimbangan-LO	3.366.972.042.806,00	2.904.797.219.470,00	462.174.823.336,00	15,91
2	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00	0,00	-	0,00
3	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan	843.890.822.000,00	1.011.942.246.000,00	(168.051.424.000,00)	(16,61)
	JUMLAH	4.210.862.864.806,00	3.916.739.465.470,00	294.123.399.336,00	7,51

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO **Rp1.199.764.000,00**

Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LO dan Pendapatan Transfer – LO. Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO tahun 2024 sebesar Rp1.199.764.000,00 atau mengalami penurunan 27,47% dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO tahun 2023 sebesar Rp1.654.058.000,00.

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO tahun 2024 sebesar Rp1.199.764.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Pendapatan Hibah	1.199.764.000,00	1.654.058.000,00	(454.294.000,00)	(27,47)
	JUMLAH	1.199.764.000,00	1.654.058.000,00	(454.294.000,00)	(27,47)

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO tahun 2024 menurut objek pendapatan sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	1.057.414.000,00	210.313.750,00	847.100.250,00	402,78
2	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	142.350.000,00	1.443.744.250,00	(1.301.394.250,00)	(90,14)
	JUMLAH	1.199.764.000,00	1.654.058.000,00	(454.294.000,00)	(27,47)

5.4.2 BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Saldo Beban tahun 2024 sebesar Rp4.781.837.881.463,36 dengan rincian sebagai berikut:

1) Beban Operasi Rp4.781.837.881.463,36

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Saldo Beban Operasi tahun 2024 sebesar Rp4.781.837.881.463,36 atau mengalami penurunan 7,44% dari Beban Operasi tahun 2023 sebesar Rp5.166.420.859.386,13 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Pegawai	503.893.460.916,78	522.147.969.659,39	(18.254.508.742,61)	(3,50)
2	Beban Barang dan Jasa	1.161.425.358.393,74	1.349.389.067.897,05	(187.963.709.503,31)	(13,93)
7	Beban Hibah	618.575.133.196,88	577.660.825.773,00	40.914.307.423,88	7,08
8	Beban Bantuan Sosial	1.499.334.000,00	3.067.537.300,00	(1.568.203.300,00)	(51,12)
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	855.391.151.442,86	883.483.521.922,24	(28.092.370.479,38)	(3,18)
10	Beban Penyisihan Piutang	2.263.173.671,10	7.468.575.321,52	(5.205.401.650,42)	(69,70)
11	Beban Transfer	1.631.890.461.640,00	1.823.008.941.919,00	(191.118.480.279,00)	(10,48)
12	Beban Lain-lain	6.899.808.202,00	194.419.593,93	6.705.388.608,07	100,00
JUMLAH		4.781.837.881.463,36	5.166.420.859.386,13	(384.582.977.922,77)	(7,44)

a. Beban Pegawai

Saldo Beban Pegawai tahun 2024 sebesar Rp503.893.460.916,78 atau mengalami penurunan 3,50% dari Beban Pegawai tahun 2023 sebesar Rp522.147.969.659,39. Rincian Beban Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	223.325.469.847,00	226.324.057.311,00	(2.998.587.464,00)	(1,32)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	198.478.179.108,25	203.505.719.510,00	(5.027.540.401,75)	(2,47)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	25.156.052.626,00	29.983.423.156,00	(4.827.370.530,00)	(16,10)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	40.013.831.513,00	43.972.411.282,00	(3.958.579.769,00)	(9,00)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	-	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.289.230.666,00	1.681.996.440,00	(392.765.774,00)	100,00
7	Beban Gaji dan Tunjangan MRP/MRPB	14.697.808.627,00	12.175.010.918,00	2.522.797.709,00	100,00
8	Beban Pegawai BOS	52.200.000,00	0,00	52.200.000,00	100,00
9	Beban Pegawai BLUD	880.688.529,53	4.505.351.042,39	(3.624.662.512,86)	100,00
JUMLAH		503.893.460.916,78	522.147.969.659,39	(18.254.508.742,61)	(3,50)

b. Beban Barang dan Jasa

Saldo Beban Persediaan tahun 2024 sebesar Rp1.161.425.358.393,74 atau mengalami penurunan 13,93% dari Beban Persediaan tahun 2023 sebesar Rp1.349.389.067.897,05. Rincian Beban Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/PENURUNAN	%
1	Beban Barang	431.902.833.132,97	378.577.727.148,99	53.325.105.983,98	14,09
1.1	Beban Barang Pakai Habis	430.693.523.207,97	378.518.274.496,99	52.175.248.710,98	13,78
1.2	Beban Barang Tak Habis Pakai	82.129.248,00	59.452.652,00	22.676.596,00	38,14
1.3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.127.180.677,00	-	1.127.180.677,00	0,00
2	Beban Jasa	360.606.950.405,02	568.670.325.961,91	(208.063.375.556,89)	(36,59)
2.1	Beban Jasa Kantor	234.203.624.737,00	374.016.850.576,91	(139.813.225.839,91)	(37,38)
2.2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	17.807.474.833,00	11.902.081.769,00	5.905.393.064,00	49,62
2.3	Beban Sewa Tanah	-	104.391.892,00	(104.391.892,00)	(100,00)
2.4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	42.968.348.810,00	52.320.396.171,00	(9.352.047.361,00)	(17,87)
2.5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	18.286.318.881,02	20.926.994.818,00	(2.640.675.936,98)	(12,62)
2.6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-	175.000.000,00	(175.000.000,00)	(100,00)
2.7	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	847.434.365,00	8.717.505.520,00	(7.870.071.155,00)	(90,28)
2.8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	30.347.196.751,00	53.476.753.157,00	(23.129.556.406,00)	(43,25)
2.9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	54.533.000,00	-	54.533.000,00	0,00
2.10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	5.451.285.000,00	39.160.155.000,00	(33.708.870.000,00)	(86,08)
2.11	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.640.734.028,00	7.870.197.058,00	2.770.536.970,00	35,20
3	Beban Pemeliharaan	46.648.746.897,00	46.928.704.878,00	(279.957.981,00)	(0,60)
3.1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.220.497.148,00	5.709.287.948,00	11.511.209.200,00	201,62
3.2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23.879.348.490,00	39.168.256.125,00	(15.288.907.635,00)	(39,03)
3.3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.548.901.259,00	2.051.160.805,00	3.497.740.454,00	170,52
4	Beban Perjalanan Dinas	264.027.563.836,75	336.049.206.210,00	(72.021.642.373,25)	(21,43)
4.1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	256.813.789.875,75	327.308.998.757,00	(70.495.208.881,25)	(21,54)
4.2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	7.213.773.961,00	8.740.207.453,00	(1.526.433.492,00)	(17,46)
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.165.094.610,00	-	15.165.094.610,00	0,00
5.1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.165.094.610,00	-	15.165.094.610,00	0,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	743.807.634,00	207.640.200,00	536.167.434,00	258,22
6.1	Belanja Barang dan Jasa BOS	743.807.634,00	207.640.200,00	536.167.434,00	258,22
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	42.330.361.878,00	18.955.463.498,15	23.374.898.379,85	123,31
7.1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	42.330.361.878,00	18.955.463.498,15	23.374.898.379,85	123,31
JUMLAH		1.161.425.358.393,74	1.349.389.067.897,05	(187.963.709.503,31)	(13,93)

c. Beban Hibah

Saldo Beban Hibah tahun 2024 sebesar Rp618.575.133.196,88 atau mengalami kenaikan 7,08% dari Beban Hibah tahun 2023 sebesar Rp577.660.825.773,00. Rincian Beban Hibah menurut objek beban sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	(30.511.321.211,00)	8.525.916.250,00	(39.037.237.461,00)	(457,87)
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	(16.386.014.070,32)	6.798.521.900,00	(23.184.535.970,32)	(341,02)
3	Beban Hibah Uang kepada BUMD	0,00	165.000.000,00	(165.000.000,00)	(100,00)
4	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	693.318.450.994,20	559.679.389.324,00	133.639.061.670,20	23,88
5	Beban Hibah Dana BOS	(30.102.936.740,00)	252.000.000,00	(30.354.936.740,00)	(12.045,61)
6	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.256.954.224,00	2.239.998.299,00	16.955.925,00	0,76
JUMLAH		618.575.133.196,88	577.660.825.773,00	40.914.307.423,88	7,08

d. Beban Bantuan Sosial

Saldo Beban Bantuan Sosial tahun 2024 sebesar Rp1.499.334.000,00 atau mengalami penurunan 51,12% dari Beban Bantuan Sosial tahun 2023 sebesar Rp3.067.537.300,00. Rincian Beban Bantuan Sosial menurut objek beban sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.233.500.000,00	991.067.500,00	1.242.432.500,00	125,36
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	84.675.000,00	0,00	84.675.000,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	460.659.000,00	1.280.000.000,00	(819.341.000,00)	(64,01)
4	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	(1.279.500.000,00)	796.469.800,00	(2.075.969.800,00)	(260,65)
5	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		1.499.334.000,00	3.067.537.300,00	(1.568.203.300,00)	(51,12)

e. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 sebesar Rp855.391.151.442,86 atau mengalami penurunan 3,18% dari Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 sebesar Rp883.483.521.922,24. Daftar Rekap Penyusutan per KIB per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran VI C**.

f. Beban Penyisihan Piutang

Saldo Beban Penyisihan Piutang tahun 2024 sebesar Rp2.263.173.671,10 atau mengalami penurunan 69,70% dari Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar Rp7.468.575.321,52.

g. Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer tahun 2024 sebesar Rp1.631.890.461.640,00 atau mengalami penurunan 10,48% dari Saldo Beban Transfer tahun 2023 sebesar Rp1.823.008.941.919,00. Rincian Beban Transfer tahun 2024 menurut objek beban sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	103.896.234.319,00	218.096.386.753,00	(114.200.152.434,00)	(52,36)
2	Beban Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi	22.486.071.456,00	21.554.461.278,00	931.610.178,00	4,32
2	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	0,00
4	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	1.455.508.155.865,00	1.533.358.093.888,00	(77.849.938.023,00)	(5,08)
JUMLAH		1.631.890.461.640,00	1.823.008.941.919,00	(191.118.480.279,00)	(10,48)

a. Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

Saldo Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa tahun 2024 sebesar Rp103.896.234.319,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	56.980.149.763,00
2	Pajak Kendaraan Bermotor	10.031.766.705,00
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.287.523.780,00
4	Pajak Rokok	30.596.794.071,00
Jumlah		103.896.234.319,00

b. Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah Ke Provinsi

Saldo Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota tahun 2024 sebesar Rp22.486.071.456,00

c. Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota

Saldo Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota tahun 2024 sebesar Rp50.000.000.000,00.

d. Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota

Saldo Beban Transfer Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota tahun 2024 sebesar Rp1.455.508.155.865,00. Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Minyak Bumi	203.292.217.321,00
2	Gas Bumi	1.252.215.938.544,00
J u m l a h		1.455.508.155.865,00

5.4.3 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Saldo Pos Luar Biasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

5.4.4 SURPLUS/DEFISIT – LO

Berdasarkan saldo Pendapatan – LO dan Beban tahun anggaran 2024 dihasilkan Defisit – LO sebesar minus Rp169.987.256.179,29 dengan perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan – LO	Rp	4.611.850.625.284,07
Beban – LO	Rp	4.781.837.881.463,36
DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp	(169.987.256.179,29)
POS LUAR BIASA	Rp	-
DEFISIT - LO	Rp	(169.987.256.179,29)

5.5 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang memberikan informasi arus masuk dan keluar kas dan setara kas pemerintah selama satu periode akuntansi serta saldo kas per tanggal laporan. Laporan Arus Kas menggambarkan Arus Kas dari 4 (empat) aktivitas yaitu:

1. Aktivitas Operasi
2. Aktivitas Investasi/*Investasi Non Keuangan*
3. Aktivitas Pendanaan/*Pembiayaan*
4. Aktivitas Transitoris/*Non Anggaran*

Dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

5.5.1 Saldo Kas Pada Awal Tahun 2024

Saldo kas pada awal tahun 2024 sebesar Rp378.298.407.347,42 terdiri dari :

- Kas di Kas Daerah	Rp 325,538,508,246.79
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 21,909,213,151.00
- Kas di Bendahara BLUD	Rp 30,850,685,949.63
- Kas di Bendahara BOS	Rp -
- Kas Lainnya	Rp -
Saldo kas pada awal tahun 2024	<u>Rp 378,298,407,347.42</u>

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas atau dana yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah. Arus Kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat selama tahun anggaran 2024 sebesar Rp488.805.451.699,79 dengan rincian sebagai berikut :

- Arus Kas Masuk	Rp 4.492.227.105.667,07
- Arus Kas Keluar	<u>Rp 4.003.421.653.967,28</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	<u>Rp 488.805.451.699,79</u>

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/*Investasi Non Keuangan*

Arus Kas dari aktivitas investasi/*Investasi Non Keuangan* mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi pemerintah dan menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang.

Arus Kas bersih dari aktivitas investasi/*Investasi Non Keuangan* Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat selama tahun anggaran 2024 sebesar minus Rp722.518.523.410,68 dengan rincian sebagai berikut :

- Arus Kas Masuk	Rp	-
- Arus Kas Keluar	Rp	722.518.523.410,68
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(722.518.523.410,68)

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus Kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran bruto sehubungan dengan defisit atau surplus anggaran.

Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan/pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat selama tahun anggaran 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Arus Kas Masuk	Rp	-
- Arus Kas Keluar	Rp	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	Rp	-

5.5.5 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Arus Kas dari aktivitas transitoris/non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran bruto yang tidak mempengaruhi anggaran.

Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris/non anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat selama tahun anggaran 2024 sebesar minus Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Arus Kas Masuk	Rp	175.685.098.599,05
- Arus Kas Keluar	Rp	175.685.098.599,05
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	Rp	-

5.5.6 Saldo Kas Pada Akhir Tahun 2024

Saldo kas akhir tahun 2024 sebesar Rp133.976.700.192,94 dengan penjelasan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Kas di BUD awal tahun 2024	Rp	378.298.407.347,42
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	488.805.451.699,79
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan	Rp	(722.518.523.410,68)
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	Rp	-
- Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	Rp	-
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	Rp	(233.713.071.710,89)
- Koreksi SiLPA	Rp	(12.133.902.448,63)
- Lain-Lain	Rp	1.525.267.005,04
Saldo kas pada akhir tahun 2024	Rp	133.976.700.192,94

Saldo kas akhir tahun 2024 sebesar Rp133.420.112.434,94 terdiri dari :

- Kas di Kas Daerah	Rp	124.193.082.616,94
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	1.609.665.577,00
- Kas di BLUD	Rp	5.713.633.822,00
- Kas di Bendahara BOS	Rp	1.479.178,00
- Kas Lainnya	Rp	1.902.251.241,00
Total	Rp	133.420.112.434,94

5.6 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit - LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

NO	URAIAN	2024	2023
1	EKUITAS AWAL	17.052.548.148.416,80	17.779.837.496.891,60
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(169.987.256.179,29)	(683.338.884.998,74)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	-	-
	SKTJM/SKTHM	-	-
	Koreksi Nilai Piutang	-	-
	Koreksi Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-
	Perhitungan Mutasi Keluar atau Masuk Aset Tetap	-	-
	Perhitungan Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya	-	-
	Penyesuaian Perhitungan Utang	-	-
	Koreksi Ekuitas	(1.482.030.218.485,94)	(43.950.463.476,04)
4	EKUITAS AKHIR	15.400.530.673.751,60	17.052.548.148.416,80

Penjelasan:

1. Saldo awal ekuitas 2024 sebesar Rp17.052.548.148.416,80 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2023.
2. Defisit – LO sebesar Rp169.987.256.179,29 merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2024.
3. Dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sehingga dilakukan koreksi mengurangi ekuitas sebesar Rp1.482.030.218.485,94 pada Neraca Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(478.372.016.136,20)
2	Penyerahan PBD/P3D (Hibah)	1.703.374.271.794,10
3	Pengurangan Aset Tetap Karena Penghapusan	16.353.257.200,00
4	Penambahan Aset Tetap dari Pihak Lain	(1.080.070.000,00)
5	Piutang Pendapatan Yang diserahkan Kepada Provinsi PBD/P3D	1.979.390.200,00
6	Koreksi Ekuitas Satpol	318.614.145,00
7	Koreksi Ekuitas Dinas Kehutanan yang diserahkan kepada PBD	64.605.819,44
8	Persediaan BLUD Raja Ampat yang diserahkan kepada PBD	130.518.000,00
9	Kas BLUD Raja Ampat yang diserahkan kepada PBD	11.389.971.594,63
10	ATB BLUD Raja Ampat yang diserahkan kepada PBD	565.000.000,00
11	Saldo AWAL Kas BLUD Kaimana	(20.027,00)
12	Koreksi Ekuitas Dinas Perhubungan yang diserahkan kepada PBD	1.280.000,00
13	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lancar	(182.201.077,00)
14	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas	(182.008.947,00)
15	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang	(636.334.811,24)
16	Koreksi Nilai Ekuitas Lainnya	228.305.960.731,21
Total		1.482.030.218.485,94

4. Saldo akhir ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.400.530.673.751,60 sesuai dengan yang tercatat dalam Laporan Neraca Pemerintah Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2024.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada

Provinsi Papua Barat yang beribukota di Manokwari sebagai pusat pemerintahan sejak berdirinya sebagai Provinsi Irian Jaya Barat, secara administrasi terdiri dari 12 (dua belas) kabupaten dan 1 (satu) kota. Namun setelah disahkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya tanggal 8 Desember 2022, secara administrasi Provinsi Papua Barat terdiri dari 7 Kabupaten sebagai berikut:

1. Kabupaten Manokwari
2. Kabupaten Teluk Bintuni
3. Kabupaten Teluk Wondama
4. Kabupaten Kaimana
5. Kabupaten Fakfak
6. Kabupaten Manokwari Selatan
7. Kabupaten Pegunungan Arfak

6.2 Ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan operasional

Salah satu peraturan yang menjadi dasar kegiatan operasional dan menjalankan roda pemerintahan adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat.

6.3 Penggabungan atau pemekaran entitas akuntansi pada tahun berjalan

Dalam periode berjalan yaitu tahun 2023 Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak mengalami perubahan susunan perangkat daerah masi tetap sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah, terdiri dari;
 1. Biro Umum;
 2. Biro Administrasi Pimpinan;
 3. Biro Organisasi;
 4. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 5. Biro Kesejahteraan Rakyat;
 6. Biro Hukum;
 7. Biro Perekonomian;
 8. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
 9. Biro Administrasi Pembangunan;
 10. Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus.

- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB);
- c. Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB);
- d. Inspektorat;
- e. Dinas, terdiri dari :
 - 1. Dinas Pendidikan;
 - 2. Dinas Kesehatan;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 4. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi;
 - 5. Dinas Sosial;
 - 6. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 8. Dinas Ketahanan Pangan;
 - 9. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
 - 10. Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 - 12. Dinas Perhubungan;
 - 13. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - 14. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - 16. Dinas Pemuda dan Olahraga
 - 17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - 19. Dinas Kelautan dan Perikanan
 - 20. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - 21. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 22. Dinas Kehutanan;
 - 23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- f. Badan, terdiri dari :
 - 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - 4. Badan Pendapatan Daerah;
 - 5. Badan Kepegawaian Daerah;
 - 6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - 7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 8. Badan Penghubung Daerah;
 - 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB VII P E N U T U P

Dalam bab penutup ini diungkapkan berupa kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan disusun memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010;
2. Laporan keuangan merupakan komponen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2024, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Papua Barat;
4. Realisasi pendapatan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.492.227.105.667,07 atau 90,72% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.951.911.688.695,78;
5. Realisasi belanja sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 sebesar Rp3.005.655.662.500,96 atau 86,11 % dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp3.490.305.008.202,20;
6. Realisasi transfer sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.720.284.514.877,00 atau 93,75% dari anggaran transfer yang ditetapkan sebesar Rp1.834.905.087.841,00;
7. Berdasarkan realisasi total pendapatan tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.492.227.105.667,07, total belanja selama tahun anggaran 2024 sebesar Rp3.005.655.662.500,96 dan total transfer selama tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.720.284.514.877,00 maka Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalami defisit sebesar Rp233.713.071.710,89;
8. Dalam tahun anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Papua Barat memperoleh penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SilPA) sebesar Rp367.655.057.876,83 dan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp0,00 sehingga pembiayaan netto Rp367.655.057.876,83. Jika diperhitungkan dengan defisit sebesar Rp233.713.071.710,89, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp133.941.986.165,94;
9. Pendapatan - LO sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.611.850.625.284,07;
10. Beban Operasi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.781.837.881.463,36;

11. Jumlah Pendapatan - LO tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.611.850.625.284,07, sedangkan total Beban Operasi selama tahun 2024 sebesar Rp4.781.837.881.463,36, sehingga terdapat Defisit - LO (Pendapatan - LO lebih kecil dari Beban Operasi) sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp169.987.256.179,29;
12. Pendapatan Luar Biasa sebesar Rp0,00 dan Beban Luar Biasa sebesar Rp0,00, sehingga jumlah Pos Luar Biasa adalah sebesar Rp0,00. Jika diperhitungkan dengan Defisit - LO sebelum Pos Luar Biasa maka Defisit – LO sebesar Rp169.987.256.179,29;
13. Gambaran Neraca Pemerintah Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2024 adalah total aset Rp15.569.386.129.498,70, total kewajiban Rp168.855.455.747,14 dan total ekuitas Rp15.400.530.673.751,60;
14. Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2024 menggambarkan saldo awal kas sebesar Rp378.298.407.347,42, arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp488.805.451.699,79, arus kas bersih aktivitas investasi/investasi non keuangan sebesar minus Rp722.518.523.410,68, arus kas bersih aktivitas pendanaan/pembiayaan sebesar Rp0,00 serta arus kas bersih aktivitas transitoris/non anggaran sebesar minus Rp0,00, koreksi SiLPA sebesar minus Rp12.168.616.475,63 dan koreksi lain-lain sebesar Rp1.525.267.005,04 sehingga saldo akhir kas sebesar Rp133.941.986.165,94.

Dari angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar di atas, maka pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024 secara umum berjalan lancar.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam rangka membangun Provinsi Papua Barat.

GUBERNUR PAPUA BARAT

DOMINGGUS MANDACAN